



LAPORAN AKTUALISASI

**(EFISIENSI KINERJA ANALIS MEDIA MELALUI
PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI ISU AKTUAL)**

Disusun oleh:

Nama : Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P

NIP : 199302092020122001

Jabatan : Analis Konten Media Sosial

Unit Kerja : Subbagian Analisis Media

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN V
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DPR RI
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI**

**(EFISIENSI KINERJA ANALIS MEDIA MELALUI
PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI ISU AKTUAL)**

Disusun oleh:

Nama : Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P

NIP : 199302092020122001

Jabatan : Analis Konten Media Sosial

Unit Kerja : Subbagian Analisis Media

Peserta Diklat,



(Larissa Amanda)

NIP. 199302092020122001

Mentor,



Suciati, S.Sos

NIP. 197207201994032002

Coach,



Indra Cakra Buana, M.Si

NIP. 199010032018011002

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Angkatan V Tahun 2021 yang berjudul “Efisiensi Kinerja Analisis Media Melalui Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual.”

Dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, semangat, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya dan adik perempuan saya yang telah memberikan ruang dan waktu, serta asupan gizi saya di rumah hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Aktualisasi;
2. Kepada teman spesial saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat ketika saya mengikuti kegiatan Latsar CPNS, mengerjakan Rancangan Aktualisasi, hingga pembuatan Laporan Aktualisasi;
3. Kepada Mantan Kepala Biro Pemberitaan DPR RI, Y.O.I Tahapari, yang telah mewawancarai saya dalam proses pemilihan CPNS dan selalu memberikan semangat '*jangan pernah menyerah!*'
4. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Drs. Mohammad Djazuli, M.Si, yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan Latsar, membuat Rancangan Aktualisasi, hingga akhirnya menyelesaikan Laporan Aktualisasi;
5. Kepala Subbagian Analisis Media, Suciati, S.Sos., yang sekaligus berperan sebagai mentor dan ibu saya ketika di kantor, serta bu Suci yang selalu mendukung, memberikan masukan, motivasi, dan saran yang bermanfaat kepada saya dalam menyelesaikan Laporan Aktualisasi;
6. Pengajar-pengajar saya selama mengikuti Latsar CPNS via *online*, yaitu pak Mulyanto, mas Kiki, pak Dwi, dan pak Lukman yang telah berjasa memberikan pemahaman dan ilmu kepada saya sehingga saya dapat

menyelesaikan Latsar CPNS, Rancangan Aktualisasi, hingga Laporan Aktualisasi secara baik;

7. *Coach* saya, mas Indra Cakra Buana, yang telah memberikan arahan dan masukan selama mengerjakan Rancangan Aktualisasi hingga pembuatan Laporan Aktualisasi;
8. Seluruh panitia penyelenggara Latsar CPNS DPR RI, bu Endah, mas Rhesa, mas Arthano, dan seluruh Tim Pusdiklat DPR RI, yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Aktualisasi;
9. Staf Administrasi Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Luthfi dan mas Damar, yang telah banyak membantu saya untuk menyelesaikan prosedur-prosedur administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian Laporan Aktualisasi;
10. Rekan-rekan kerja Analis Media, yaitu Tasya, pak Fahmi, kakak Kiki, Fitri, Ros, dan pak Sunarya yang telah memberikan masukan kepada saya dalam penyelesaian Laporan Aktualisasi;
11. Seluruh rekan-rekan CPNS DPR RI, khususnya kepada Sinchan, Eki, mz Ridwan, Bianca, Hira, Agung, Saum, Novel, Prima, Hendra, dan mas Bimo yang selalu berbagi informasi dan pengetahuan sebagai masukan bagi saya untuk dapat membuat dan menyelesaikan pembuatan Laporan Aktualisasi;
12. Penguji rancangan aktualisasi saya, bu Shanty Irma, yang telah memberikan masukan-masukan, baik dari sisi substansi maupun teknis dalam penulisan Rancangan Aktualisasi dan Laporan Aktualisasi saya;
13. Seluruh musisi tanah air dan luar negeri, atas karya-karya lagu yang diciptakan sehingga dapat membuat saya bersemangat dan menemani hari-hari saya dalam menyelesaikan pembuatan Laporan Aktualisasi.

Laporan Aktualisasi ini berisi tentang laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan penulis dalam mengaktualisasikan Rancangan Aktualisasi yang sebelumnya telah dibuat oleh penulis sebagai Analis Konten Media Sosial di Subbagian Analisis Media. Selain itu, Laporan Aktualisasi ini juga merupakan

bentuk internalisasi dan aktualisasi dari peran, kedudukan, maupun nilai-nilai dasar ASN yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, serta sebagai wujud dari praktik prinsip Manajemen ASN, *Whole of Government*, dan Pelayanan Publik.

Penulis berharap agar Laporan Aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi pekerjaan, khususnya di Subbagian Analisis Media, sehingga dapat mewujudkan *output* kinerja yang semakin berkualitas, mengedepankan akuntabilitas, dan transparan.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan berharap penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Hormat Saya,

Larissa Amanda

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat.....	6
BAB II: PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN	8
A. Visi dan Misi Unit Kerja.....	8
B. Struktur Organisasi.....	10
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	11
BAB III: PENETAPAN ISU PRIORITAS.....	12
A. Identifikasi Isu	12
1. Isu Ke-1	12
2. Isu Ke-2	17
3. Isu Ke-3	22
B. Penetapan Isu Prioritas	24
C. Gagasan Pemecahan Isu	27
BAB IV: RANCANGAN AKTUALISASI	31
A. Rancangan Aktualisasi	31
B. <i>Stakeholder</i>	41
C. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	43
D. Analisis Dampak.....	45
E. Jadwal Kegiatan	46
BAB V: PELAKSANAAN AKTUALISASI	49
A. Rancangan Aktualisasi	55
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan.....	41
C. <i>Stakeholder</i>	77
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	80

E. Analisis Dampak.....	81
BAB VI: PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
Daftar Pustaka.....	85
Lampiran.....	86

Daftar Tabel

Tabel III.1 Deskripsi Kriteria <i>Urgency</i>	25
Tabel III.2 Deskripsi Kriteria <i>Seriousness</i>	25
Tabel III.3 Deskripsi Kriteria <i>Growth</i>	25
Tabel III.4 Tabel Penentuan Isu Prioritas	26
Tabel III.5 Analisis SWOT	28
Tabel IV.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS	32
Tabel IV.2 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi	46
Tabel V.1 Matriks Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	49

Daftar Gambar

Gambar II.1 Bagan Biro Pemberitaan Parlemen.....	10
Gambar II.2 Bagian Media Cetak dan Media Sosial.....	10
Gambar III.1 Tangkapan Layar Isu <i>Didrop</i> Ketika Diperiksa Oleh Atasan .	15
Gambar III.2 Tangkapan Layar Bukti Pengiriman SMS <i>Gateway</i> Berupa <i>Link</i> dan Bersifat Satu Arah	19
Gambar V.1 Pertemuan Dengan Kabag Medtaksos, Kasub Analis Media, dan Rekan Kerja Analis Media.....	56
Gambar V.2 Membuat Draft Pedoman di Ruang Kerja Bagian Media Cetak dan Media Sosial.....	58
Gambar V.3 Forum Dengar Pendapat Analis Media Untuk Mendapatkan Masukan Mengenai Pedoman.....	60
Gambar V.4 Penulis Mengedit <i>Draft</i> Pedoman Menjadi Booklet Dengan Ukuran A5.....	63
Gambar V.5 Penulis Mensosialisasikan Pedoman Kepada Rekan Kerja ...	65
Gambar V.6 Penulis Mensosialisasikan Pedoman Kepada Kasubbag Analis Media (dalam bentuk PDF).....	65
Gambar V.7 Salah Satu Tangkapan Layar Penulis Menyebarkan Kuisisioner <i>Google Form</i> Kepada Rekan Kerja Analis Media	68
Gambar V.8 Daftar Pertanyaan Pada Kuisisioner Monitoring Penerapan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual	71
Gambar V.9 Hasil Kuisisioner	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI adalah aparatur Pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan baik, maka setiap ASN harus dapat memiliki integritas yang juga baik. Sebagaimana diketahui, bahwa Setjen DPR RI mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa ASN juga harus menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Sehingga penting bagi ASN untuk dapat memiliki kapabilitas dan integritas yang baik, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi ASN secara optimal.

Oleh karena itu, untuk membekali ASN agar dapat memiliki kapabilitas dan integritas tersebut, maka Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus mengikuti pelatihan dasar (Latsar) yang didalamnya mencakup agenda orientasi terhadap lingkungan kerja, sikap dan perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, kedudukan dan peran ASN, hingga melakukan agenda rancangan aktualisasi.

Rancangan Aktualisasi ini bertujuan agar nantinya sebagai ASN, kita dapat peka terhadap isu-isu aktual yang menjadi permasalahan dalam

lingkup kerja, ataupun hal-hal yang perlu dilakukan inovasi ke depannya sehingga dapat membantu terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Isu-isu aktual dalam rencana rancangan aktualisasi tersebut dapat dianalisis secara sederhana dengan metode *Urgency, Seriousness, dan Growth (USG)*, Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak (AKPL), maupun metode lainnya. Kemudian, berdasarkan isu-isu aktual yang telah ditentukan tersebut, ASN harus dapat memberikan pemecahan masalah guna meningkatkan mutu manajemen ASN, *Whole of Government (WoG)*, ataupun pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit kerja, dalam hal ini Setjen DPR RI di Bagian atau Subbagian masing-masing ASN.

Bagian penting dalam Rancangan Aktualisasi yaitu menempatkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) sebagai pedoman perilaku dalam pelaksanaan Rancangan kegiatan Aktualisasi tersebut. Agenda pembuatan Rancangan Aktualisasi juga diharapkan dapat membangun dan mengembangkan kompetensi ASN dalam menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta dapat menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh lembaga.

Dalam menyusun Rancangan Aktualisasi, CPNS diharapkan dapat menjadi seorang PNS yang profesional dengan mampu melakukan sejumlah hal sebagai tahapan awal berikut ini:

1. Mampu mengidentifikasi, menyusun, dan menetapkan isu atau permasalahan dari lingkungannya;

2. Mampu memberikan gagasan solusi atau pemecahan masalah dalam bentuk rencana dan *output* kegiatan;
3. Mampu menjelaskan keterkaitan antara rancangan kegiatan yang diusulkan dengan substansi mata pelatihan Manajemen ASN, WoG, dan pelayanan publik;
4. Mampu mendeskripsikan dan mengaktualisasikan nilai ANEKA dalam rencana kegiatan yang diajukan;
5. Mampu menjelaskan dan mendeskripsikan output atau hasil dari rencana aktualisasi kegiatan yang diajukan berkaitan dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, dalam hal ini Setjen DPR RI.

Oleh karena itu, penulis sebagai CPNS Setjen DPR RI di Unit Kerja Subbagian Analisis Media, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, melihat bahwa, untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka harus didukung dan dimulai dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari di lingkup kerja. Penulis melihat, sebagai Analis Media yang salah satunya bertugas untuk membuat Rekomendasi Isu Aktual, **mengidentifikasi belum adanya persepsi yang sama terhadap penentuan dan pemilihan isu yang akan dijadikan rekomendasi isu aktual.**

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan solusi atau gagasan penyelesaian masalah agar penulisan dan pemilihan isu dalam Rekomendasi Isu Aktual menjadi lebih terarah dan tajam, yaitu dibuatnya pedoman pemilihan isu rekomendasi isu aktual. Gagasan penyelesaian masalah tersebut dituangkan penulis dalam bentuk penulisan Rancangan Aktualisasi yang berjudul "Efisiensi Kinerja Analis Media Melalui Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual."

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS);
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 94/K.1/PDP.07/2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi yaitu agar ASN dapat menentukan arah dan target yang jelas yang akan dicapai dalam Rancangan Aktualisasi yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi fokus, terukur, terarah, dan mudah untuk dilakukan pemantauan.

Tujuan dari perencanaan aktualisasi tersebut dapat dilihat dan didalami melalui konsep *Specific, Measureable, Attainable, Realistic, dan Timebound* (SMART). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan aktualisasi adalah agar didapat tujuan yang jelas dan spesifik dari implementasinya, terukur dengan baik, memiliki target yang realistis, masuk akal dan layak, serta memiliki waktu yang cukup untuk diselesaikan.

Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan aktualisasi, baik dalam implementasinya maupun *output* yang dihasilkan, dapat memberikan perbaikan dan meningkatkan mutu manajemen ASN, WoG, dan juga pelayanan Publik. Pelaksanaan sebuah Rancangan Aktualisasi sebagai sebuah kegiatan inovatif, juga bertujuan memberi nilai tambah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya

yang dimiliki, berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, dan merupakan kegiatan yang dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan, dalam artian bukan hanya pada masa habituasi saja, tetapi tetap berkelanjutan untuk mengoptimalkan, memberikan kemudahan, dan inovasi dalam pekerjaan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah ASN juga dapat menerapkan nilai-nilai ANEKA dalam mengimplementasikan Rancangan Aktualisasi, sehingga nilai-nilai ASN dapat bertumbuh dari dalam diri sendiri maupun di lingkungan kerja.

D. Manfaat

1. Bagi Diri Sendiri

- a. CPNS dapat menjadikan kegiatan aktualisasi sebagai kesempatan atau wadah untuk mengembangkan kompetensi diri sebagai langkah awal menjadi ASN yang berintegritas dan mampu berpikir kritis;
- b. Mampu menerapkan nilai-nilai ASN dalam melakukan pekerjaan, sehingga memiliki tanggung jawab dan integritas terhadap tugas dan jabatan, serta memiliki semangat nilai-nilai Pancasila;
- c. Memiliki pembekalan pelatihan dasar, khususnya dalam melakukan rancangan aktualisasi, sehingga ke depannya dapat menjadi ASN yang profesional, berkarakter, dan berintegritas;
- d. Memudahkan dan membantu dalam mengidentifikasi isu yang akan dijadikan rekomendasi isu aktual.

2. Bagi Setjen DPR RI

- a. Meningkatkan hasil atau output dari pekerjaan di Subbagian ataupun Subbagian masing-masing;

- b. Dapat membantu melancarkan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan;
- c. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, efektif, efisien, dan optimal;
- d. Mempermudah kinerja Subbagian atau Bagian masing-masing;
- e. Meningkatkan sinergisitas antara Setjen DPR RI dengan Anggota Dewan.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Tugas dan Fungsi Biro Pemberitaan Parlemen

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Biro Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di media cetak dan media sosial, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
- c. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website;
- d. Penyelenggaraan televisi dan radio;
- e. Penyelenggaraan urusan penerbitan;
- f. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Biro Pemberitaan Parlemen memiliki tiga Bagian, yaitu Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Bagian Televisi dan Radio Parlemen, serta Bagian Penerbitan. Dalam hal ini, penulis sebagai CPNS Analis Konten Media Sosial, berada di dalam Bagian Media Cetak dan Media Sosial dengan Subbagian

Analisis Media. Adapun Bagian Media Cetak dan Media Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemberitaan di media cetak dan *website*, media sosial, dan melaksanakan analisis media. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

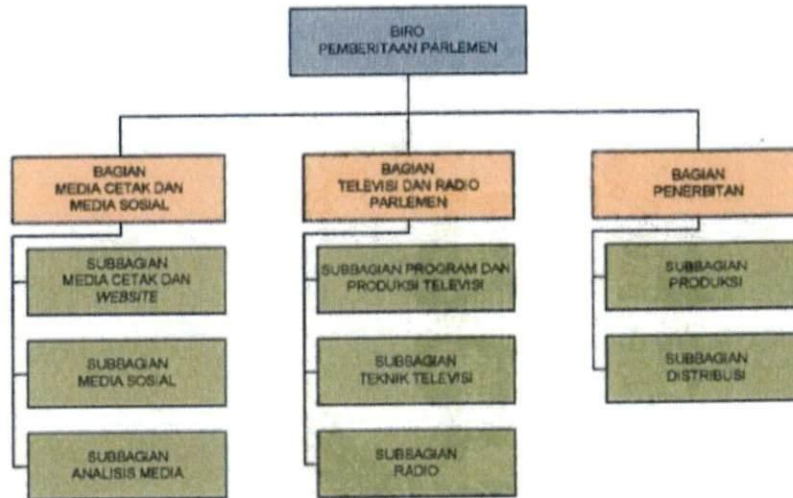
1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
2. Penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, *website*, media sosial, dan analisis media;
3. Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak dan *website*;
4. Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial;
5. Pelaksanaan analisis media;
6. Pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

Dalam Bagian Media Cetak dan Media Sosial, terdapat tiga Subbagian yaitu Subbagian Media Cetak dan *Website*, Subbagian Media Sosial, dan Subbagian Analisis Media. Secara umum, tugas masing-masing Subbagian yakni sebagai berikut:

1. Subbagian Media Cetak dan Website mempunyai tugas melakukan pengelolaan pemberitaan di media cetak dan website;
2. Subbagian Media Sosial mempunyai tugas melakukan pengelolaan pemberitaan di media sosial;
3. Subbagian Analisis Media mempunyai tugas melakukan analisis media dan pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial.

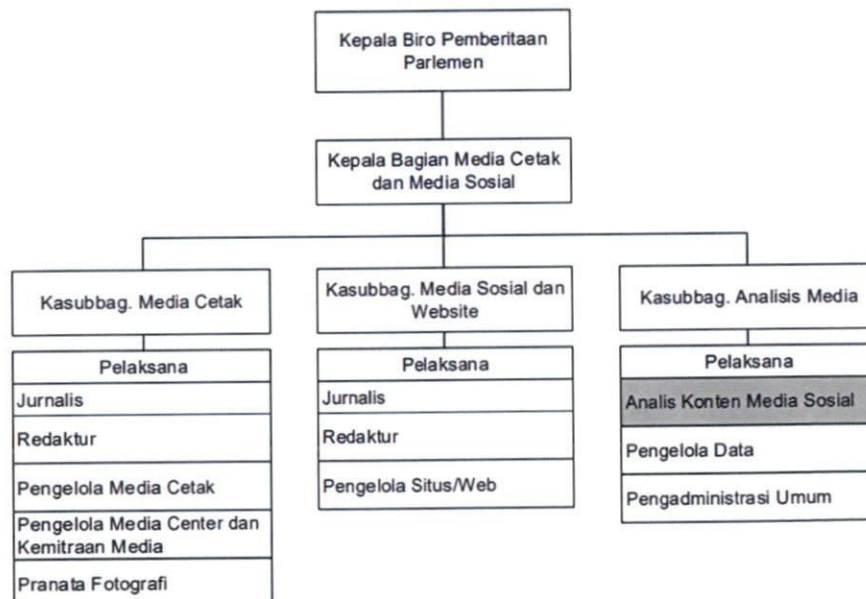
B. Struktur Organisasi

1. Bagan Biro Pemberitaan Parlemen



Gambar II.1 Bagan Biro Pemberitaan Parlemen

2. Bagan Bagian Media Cetak dan Media Sosial



Gambar II.2 Bagan Bagian Media Cetak dan Media Sosial

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Secara umum, kegiatan analisis media berfungsi untuk memberikan informasi terkini berupa hasil analisis media kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta Sekretariat Jenderal DPR RI, sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas Dewan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk mendukung hal tersebut, Subbagian Analisis Media memiliki sejumlah tugas pokok yang tercantum dalam Analisa Jabatan tahun 2020. Tugas pokok dari Analis Konten Media Sosial yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun konsep kebijakan atau aturan tentang pengelolaan media, baik media cetak, media sosial dan *website*, maupun analisis media;
2. Mencari dan mengumpulkan berita dari media cetak, media sosial, dan media *online* terkait suatu topik tertentu;
3. Menyusun analisa terhadap berita maupun isu yang beredar di media cetak, media sosial, dan media *online*;
4. Menyusun laporan rekapitulasi topik berita seputar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disertai dengan pemberian keterangan kategori opini (positif/negatif);
5. Menyusun konsep laporan kinerja unit kerja baik secara berkala maupun setiap waktu diperlukan;
6. Menyimpan arsip dan dokumentasi analisis media;
7. Mengelola *database output* analisis media;
8. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
9. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.

BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. IDENTIFIKASI ISU

Dengan melakukan *environmental scanning*, penulis mencoba mengidentifikasi sejumlah isu yang dapat ditemukan, khususnya dalam Subbagian Analisis Media. Penentuan identifikasi isu berikut ini, akan penulis klasifikasikan dengan melihat melalui sudut pandang isu kritis. Adapun pemahaman isu kritis yaitu topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Berdasarkan urgensinya, isu kritis dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Isu saat ini (*current issue*) merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan;
2. Isu berkembang (*emerging issue*) merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut;
3. Isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen (sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dsb) yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan.

Berdasarkan pengklasifikasian isu tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi sejumlah isu atau permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1. Belum Adanya Kesamaan Persepsi Antar Analisis Media Terhadap Penentuan dan Pemilihan Isu Yang Akan Dijadikan Rekomendasi Isu Aktual (Isu Saat Ini/*Current Issue*)**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya saya di sini sebagai Analis Konten Media Sosial, adalah melakukan tugas dan kewajiban saya, salah satunya adalah untuk membuat rekomendasi isu aktual.

Rekomendasi isu aktual merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan tugas dan fungsi dewan, seperti pengawasan terhadap Pemerintah, fungsi legislasi, fungsi anggaran, hingga hubungan diplomasi. Rekomendasi isu aktual ditentukan dari isu aktual nasional dan strategis yang diperoleh dari berbagai media cetak, online, dan juga siaran. Analis mengidentifikasi isu yang sedang berkembang ataupun isu-isu strategis yang diangkat dan perlu diberikan komentar oleh Pimpinan dan Anggota Dewan, khususnya isu-isu yang sedang banyak diberitakan di media massa.

Rekomendasi yang diberikan menyangkut *stakeholders* terkait ataupun pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan isu yang diangkat. Setiap harinya analis mengangkat sekitar 3-4 isu untuk dijadikan rekomendasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan.

Namun, dalam membuat rekomendasi isu aktual yang harus didahului dengan penentuan isu yang akan diangkat, setiap Analis Media masih belum memiliki persepsi yang sama atau seragam terhadap penentuan isu yang akan diangkat menjadi rekomendasi isu aktual. Padahal, sejatinya penentuan isu merupakan langkah awal dari penyusunan sebuah rekomendasi yang dapat mendukung kinerja dewan. Oleh karena itu, setiap analis media diharapkan dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dalam menentukan isu yang akan diangkat menjadi rekomendasi.

Apabila setiap analis media masih belum memiliki kesamaan persepsi mengenai isu yang akan diangkat untuk dijadikan rekomendasi,

maka akan menyebabkan terjadinya subjektifitas ataupun perbedaan pendapat untuk isu-isu yang dapat diangkat ataupun tidak. Selain itu, di ranah pimpinan ada kemungkinan sejumlah isu akan *didrop* atau diturunkan, dikarenakan tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan. Atau, jikapun rekomendasi yang tidak sesuai sampai kepada Pimpinan dan Anggota DPR, maka ada kemungkinan rekomendasi tersebut dipertanyakan atau tidak digunakan karena lingkup isu yang tidak sesuai.

Informasi Pendukung:

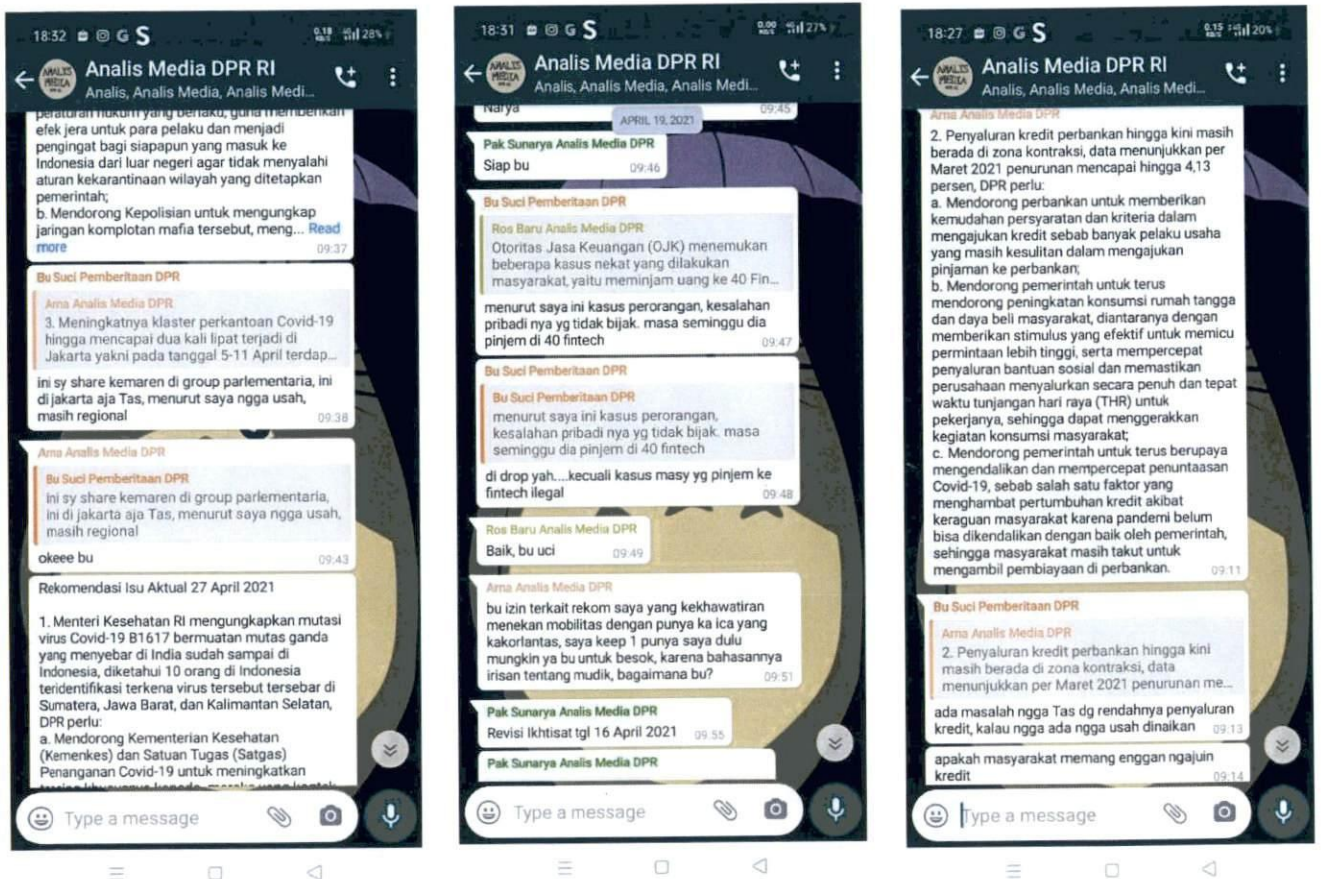
- Teman-teman sesama analis media lainnya menyarankan perlunya kesamaan penentuan isu yang dapat diangkat dalam rekomendasi isu aktual;
- Hanya ada petunjuk teknis secara tertulis mengenai pelaksanaan analisis media cetak dan media online, namun belum ada pedoman atau petunjuk pelaksanaan untuk pembuatan rekomendasi isu aktual;
- Masih seringnya terjadi perbedaan-perbedaan persepsi mengenai isu-isu yang akan diangkat dalam pembuatan rekomendasi isu aktual, yang diketahui melalui percakapan-percakapan sehari-hari di kantor.

Penyebab:

- Belum adanya pedoman baku untuk penentuan isu dalam penyusunan rekomendasi isu aktual;
- Belum adanya arahan secara khusus untuk melakukan upaya menyamakan persepsi isu dalam pembuatan rekomendasi isu aktual;
- Latar belakang pendidikan Analis Media berbeda-beda;
- Selama ini, penentuan isu untuk rekomendasi isu aktual berdasarkan petunjuk dan arahan dari atasan, serta hasil diskusi di antara analis media.

Dampak:

- Terjadinya subjektifitas pemilihan isu dalam rekomendasi isu aktual;
- Dalam melakukan klasifikasi isu, memakan waktu lebih lama dikarenakan diperlukan kesepakatan secara informal terlebih dahulu;
- Setelah dikoreksi oleh atasan, dari sejumlah isu yang telah dipilih dan dibuat, masih adanya potensi sejumlah isu ataupun hasil analisis media yang *didrop* atau tidak jadi dibuat rekomendasinya.



Gambar III.1 Tangkapan Layar Isu Didrop Ketika Diperiksa Oleh Atasan

Keterkaitan Dengan Materi Pelatihan:

- **Akuntabilitas**

Belum adanya kesamaan persepsi dalam menentukan isu untuk penyusunan rekomendasi isu aktual yang merupakan tugas Analisis Media, menyebabkan nilai akuntabilitas untuk pertanggungjawaban atas tugas yang dilakukan menjadi sebuah pertanyaan. Hal tersebut dikarenakan, bagaimana sebuah tugas dapat dipertanggungjawabkan dengan baik apabila tidak ada keseragaman pemahaman mengenai tugas yang dibuat.

- **Komitmen Mutu**

Efektifitas dan efisiensi juga menjadi nilai yang berkaitan dari belum adanya kesamaan persepsi dalam menentukan isu untuk penyusunan isu rekomendasi isu aktual. Untuk dapat menciptakan budaya kinerja yang efektif dan efisien, maka pengerjaan tugas harus didukung dengan metode dan sumber daya yang juga optimal, terlebih lagi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR sedang melakukan program *Quick Wins* yang mengharuskan pengerjaan analisis media, termasuk rekomendasi isu aktual dapat selesai cepat, yaitu maksimal pukul 10.00 WIB setiap hari kerja.

- **Manajemen ASN**

Dalam manajemen ASN, seorang ASN dituntut untuk dapat mengerjakan tugas dan kewajibannya secara cermat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman setiap analis media untuk dapat melakukan pemilihan isu dengan tepat harus dapat dilakukan guna mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan.

- ***Whole of Government***

Untuk dapat memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terhadap pemilihan isu untuk penyusunan rekomendasi isu aktual, setiap analis

media harus berkoordinasi dengan baik dengan sesama rekan-rekan analis media (internal).

- **Pelayanan Publik**

Salah satu aspek pelayanan publik yang prima yaitu menghasilkan *output* pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan persepsi yang sama untuk pemilihan isu dalam penyusunan rekomendasi isu aktual. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program *Quick Wins* Setjen DPR RI, yaitu bagaimana asas kemanfaatan hasil analisis media, salah satunya rekomendasi isu aktual, bagi Pimpinan DPR, Anggota DPR, Setjen DPR, dan Biro Pemberitaan Parlemen (produk pelayanan publik).

2. Belum Seluruh Pihak Terkait, Memberikan *Feedback* Terhadap Pengiriman Hasil Analisis Media Melalui SMS Gateway Sebagai Pola Pelayanan Elektronik (Isu Berkembang/*Emerging Issue*)

Saat ini, pengiriman Hasil Analisis Media, yaitu berupa Ikhtisar Berita dan Rekomendasi Isu Aktual, dikirimkan kepada sejumlah pejabat terkait seperti Sekretaris Jenderal DPR RI, Deputi Bidang Persidangan DPR RI, Kepala Biro Persidangan I DPR RI, Inspektur Utama DPR RI, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI, dan Kepala Bagian Sekretariat Komisi, serta kepada seluruh Pimpinan DPR dan Anggota DPR. Pengiriman sebagian dilakukan melalui email, grup whatsapp, dan SMS Gateway. Namun, pengiriman SMS Gateway sebagai pola pelayanan elektronik harus dapat diketahui bagaimana kecepatan dalam pemberian hasil Analisis Media dan kemudahan Anggota Dewan untuk mengakses hasil Analisis Media, khususnya melalui SMS Gateway, dikarenakan pengiriman berupa *link*, dan saat ini tidak semua orang *concern* untuk melihat SMS yang masuk.

Hal tersebut menjadi penting karena perlunya keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan kepada seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, perlunya sejumlah *feedback* atau forum evaluasi agar ke depannya dapat diketahui apakah target dari pengiriman hasil analisis media dapat tersampaikan tepat sasaran atau tidak.

Apabila ke depannya tidak ada *feedback* dari seluruh pihak yang dikirimkan Hasil Analisis Media, maka Analisis Media tidak dapat mengetahui indikator keberhasilan yang telah tercapai, mengingat dalam Program *Quick Wins* yang dicanangkan oleh Setjen DPR RI, terdapat sejumlah manfaat pengiriman Ikhtisar Berita dan Rekomendasi Isu Aktual bagi Pimpinan DPR, Anggota DPR, Setjen DPR, dan Biro Pemberitaan Parlemen yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Pimpinan DPR diharapkan dapat mengetahui pemberitaan terkait DPR maupun isu-isu dari rekomendasi, sehingga Pimpinan DPR memiliki acuan untuk menanggapi atau merespon isu-isu yang sedang berkembang;
- b. Bagi Anggota DPR diharapkan dapat mengetahui pemberitaan terkait DPR maupun isu-isu dari rekomendasi, sehingga Anggota DPR memiliki acuan untuk menanggapi atau merespon isu-isu yang sedang berkembang;
- c. Bagi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR diharapkan dapat mengetahui pemberitaan terkait DPR maupun isu-isu dari rekomendasi;
- d. Bagi Biro Pemberitaan Parlemen diharapkan dapat mengetahui pemberitaan terkait DPR maupun isu-isu dari rekomendasi, sehingga pemberitaan yang muncul di media internal DPR (TV dan Radio, Humas, maupun Penerbitan) dapat berkesinambungan dan memiliki acuan yang sama.

Untuk dapat mengetahui apakah manfaat tersebut dapat terwujud atau tidak, maka diperlukan feedback menyeluruh ataupun forum evaluasi, guna mengetahui dan memperbaiki target-target yang dapat dicapai, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan target dari program *Quick Wins* Setjen DPR RI.

Informasi Pendukung:

- Belum semua Anggota Dewan melakukan *feedback* dan merespon hasil analisis media yang dikirimkan melalui SMS *Gateway*;
- Link yang dikirimkan kepada Anggota dan Pimpinan DPR tersebut hanya dibatasi berlaku selama satu bulan, hal ini berkaitan dengan keterbukaan informasi.

Tanggal	Pengguna	Pesan	Aksi
2020-12-28 09:20:28	suciati	Yth. Bpk Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI, berikut link hasil Analisis Media 28/12/2020: https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terima kasih	SHOW
2020-12-28 09:20:00	suciati	Yth. Bpk Kabiro Kesekretariatan Pimp. DPR RI, berikut link hasil Analisis Media 28/12/2020 https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terimakasih	SHOW
2020-12-28 09:19:11	suciati	Yth. Bpk Plt Kepala Biro PP DPR RI, berikut link hasil Analisis Media 28/12/2020 https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terima kasih	SHOW
2020-12-28 09:18:36	suciati	Yth. Bapak Inspektur Utama DPR RI, berikut link hasil Analisis Media 28/12/2020: https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terima kasih	SHOW
2020-12-28 09:18:17	suciati	Yth. Ibu Kepala Biro Persidangan I DPR RI, berikut link hasil Analisis Media 28/12/2020: https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terima kasih	SHOW
2020-12-28 09:17:50	suciati	Yth. Ibu Deputi Bidang Persidangan DPR RI, berikut link hasil Analisis Media 28/12/2020: https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terima kasih	SHOW
2020-12-28 09:17:25	suciati	Yth. Bapak Sekretaris Jenderal DPR RI, berikut link hasil Analisis Media 28/12/2020: https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terima kasih	SHOW
2020-12-28 09:14:43	suciati	Yth. Bapak/Ibu Pimpinan & Anggota DPR RI, berikut link hasil Analisis Media 28/12/2020: https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/W4Y9EiNcFoQke6M Terima kasih	SHOW

Gambar III.2 Tangkapan Layar Bukti Pengiriman SMS *Gateway* Berupa *Link* dan Bersifat Satu Arah

Penyebab:

- Perlunya kerjasama dengan bagian lain, dalam hal ini BDTI, dalam membuat dan mengevaluasi sistem SMS *Gateway*;
- Belum memungkinkan dilakukannya whatsapp *Gateway* yang dapat menampilkan *output* berupa tulisan sehingga langsung dapat dibaca, dikarenakan sistem tersebut belum diprogramkan oleh BDTI;
- Masih belum ditemukannya cara lain yang lebih efektif agar Hasil Analisis Media dapat tersampaikan secara adil dan cepat kepada seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan sejumlah pejabat terkait di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dampak:

- Apabila belum ada *feedback* dari seluruh pihak yang dikirimkan Hasil Analisis Media, maka Analisis Media tidak dapat mengetahui indikator keberhasilan yang telah tercapai, mengingat dalam Program *Quick Wins* yang dicanangkan oleh Setjen DPR RI, terdapat sejumlah manfaat dari pengiriman Ikhtisar Berita dan Rekomendasi Isu Aktual bagi Pimpinan DPR, Anggota DPR, Setjen DPR, dan Biro Pemberitaan Parlemen;
- Belum dapat diketahui secara pasti apakah target dari pengiriman Hasil Analisis Media dapat tercapai secara menyeluruh atau tidak;
- Analisis Media belum dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kinerja apabila belum ada *feedback* atau forum evaluasi dari sejumlah pihak terkait.

Keterkaitan Dengan Materi Pelatihan:

- **Akuntabilitas**

Mendapatkan *feedback* atau masukan dari seluruh pihak terkait, menunjukkan bahwa ada dasar yang kuat untuk dapat membuat laporan pertanggungjawaban Analisis Media, mengingat hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas.

- **Nasionalisme**

Salah satu aspek penting dari nilai nasionalisme adalah musyawarah. Dengan meminta *feedback* ataupun membuka forum evaluasi, maka dapat dilakukan musyawarah ataupun pendapat mengenai hasil pengiriman Analisis Media setiap harinya kepada Pimpinan DPR, Anggota DPR, Setjen DPR, dan Biro Pemberitaan Parlemen.

- **Etika Publik**

Dalam mendapatkan *feedback* atau mengadakan forum evaluasi, harus dilakukan dengan sopan dan tutur kata maupun sikap yang baik, sehingga proses diskusi dan *feedback* dapat berjalan dengan baik dan menerapkan etika ASN yang baik.

- **Komitmen Mutu**

Dengan mendapatkan *feedback* dari seluruh pihak terkait, maka ke depannya diharapkan Analisis Media dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja, baik dari metode yang digunakan maupun seluruh SDM yang terlibat dalam penyusunan hasil analisis media.

- **Whole of Government**

Pemberian *feedback* atau forum evaluasi dapat tercipta apabila ada koordinasi yang baik antar satu bagian dengan bagian lainnya.

- **Pelayanan Publik**

Dengan adanya feedback dan forum evaluasi, maka didapat masukan untuk dapat meningkatkan performa dan kinerja dari Subbagian Analisis Media, sehingga dapat menghasilkan *output* pelayanan yang berkualitas.

3. Belum Ada Sistem yang Dapat Merekap Hasil Analisis Media (*Bank Data*), Khususnya Rekomendasi Isu Aktual (Isu Potensial)

Untuk mempermudah kinerja analisis media, pengumpulan data-data yang telah direkap berdasarkan kategori per-isu menjadi hal yang penting. Hal tersebut dapat mempermudah apabila analisis media ingin mengetahui dan membaca terakhir perkembangan analisis yang dilakukan, mengingat isu yang juga terus berkembang. Namun, belum ada sistem yang dapat merekap seluruh hasil analisis media (*Bank Data*), khususnya rekomendasi isu aktual, sehingga dapat mempermudah pencarian isu-isu yang pernah dibuat sebelumnya. Mengingat, selama ini pencarian isu-isu sebelumnya masih dilakukan secara manual dengan membuka dokumen terkait ataupun memanfaatkan kolom search dalam email dan *whatsapp*. Oleh karena itu, adanya bank data untuk rekomendasi isu aktual menjadi suatu hal yang penting guna mempermudah dan mempercepat kinerja tim Analisis Media.

Dengan belum adanya sistem seperti bank data untuk merekap data analisis media, khususnya rekomendasi isu aktual, analisis media akan mengalami kesulitan atau membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mencari dokumen atau berkas sebelumnya secara manual. Mengingat, catatan *history* di *email* atau *whatsapp* memiliki batasan kapasitas, sehingga tetap ada kemungkinan untuk mencari data secara manual.

Informasi Pendukung:

- Belum adanya sistem yang dimiliki oleh analis media secara khusus untuk menyimpan data-data rekomendasi isu aktual yang telah teruji keamanannya, kecuali *cloud* DPR. Namun, *cloud* DPR bersifat menyimpan seluruh *database* analis media berbentuk dokumen;
- Terkadang, analis media membutuhkan data rekomendasi yang telah dibuat sebelumnya untuk dapat memperdalam dan memperkaya data pembuatan analisis dalam rekomendasi.

Penyebab:

- Bagian Media Cetak dan Media Sosial belum memiliki tim IT sendiri, sehingga harus bekerja sama dengan bidang lain;
- Hal ini dirasa masih belum urgen, namun ke depannya dapat membantu mempermudah kinerja analis media;
- Kurang Sumber Daya Manusia (SDM) analis media yang bertugas untuk mengelola data untuk dimasukkan ke dalam sistem.

Dampak:

- Analis media terkadang mengalami kesulitan dalam menemukan rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat sebelumnya;
- Apabila *history chat* whatsapp terhapus dan email dibersihkan, maka pencarian rekomendasi terdahulu atau yang telah dibuat sebelumnya, dilakukan secara manual dengan melihat dokumen-dokumen lama yang cukup memakan waktu.

Keterkaitan Dengan Materi Pelatihan:

- **Akuntabilitas**

Adanya data yang tercatat secara rapih dan menyeluruh, dapat menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas diterapkan dengan baik. Apabila sistem berupa bank data analis media ini diwujudkan, maka dapat memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan oleh analis media, khususnya dalam penyusunan rekomendasi isu aktual.

- **Manajemen ASN**

Dalam melakukan tugas dan kewajiban ASN, maka keberadaan bank data analis media ini dapat mempermudah kinerja analis media, sehingga dapat mendukung dan mempercepat kinerja yang dilakukan. Mengingat, ASN juga harus dapat menghadapi dan memberdayakan kemajuan teknologi saat ini guna mempermudah kinerja.

- **Whole of Government**

Salah satu *best practice* pada materi pelatihan *whole of government* yaitu adanya cara kerja baru. Adanya bank data pada analis media merupakan salah satu perwujudan dari *best practice* tersebut. Dengan adanya bank data yang terpusat di satu sistem akan memudahkan koordinasi dan integrasi antar sesama analis media, sehingga dapat meminimalisir adanya perbedaan-perbedaan data antara satu analis media dengan analis media lainnya.

B. PENETAPAN ISU PRIORITAS

Untuk melakukan finalisasi isu atau menetapkan isu prioritas, maka saya harus menentukan skala prioritas dari setiap isu yang sudah saya identifikasi sebelumnya. Dalam menentukan finalisasi isu, maka saya menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG). Kriteria dari metode USG ini dimulai dari sangat USG hingga tidak sangat USG. Berikut pemaparan definisi dari USG:

- *Urgency*: Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti;
- *Seriousness*: Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan;
- *Growth*: Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Untuk mempermudah menilai skala prioritas dari masing-masing, maka terlebih dahulu saya akan memaparkan masing-masing deskripsi kriteria pada USG, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.1 Deskripsi Kriteria *Urgency*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Mendesak	Harus segera dilakukan dalam kurun waktu dekat.
4	Mendesak	Harus dilakukan dalam kurun waktu dekat.
3	Cukup Mendesak	Sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu dekat.
2	Kurang Mendesak	Tidak harus dilakukan dalam kurun waktu dekat.
1	Tidak Mendesak	Bisa ditunda hingga batas waktu tertentu.

Tabel III.2 Deskripsi Kriteria *Seriousness*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Serius	Sangat berdampak kurang baik apabila tidak dilakukan.
4	Serius	Berdampak kurang baik apabila tidak dilakukan.
3	Cukup Serius	Cukup berdampak kurang baik apabila tidak dilakukan.
2	Kurang Serius	Tidak terlalu berdampak kurang baik apabila tidak dilakukan.
1	Tidak Serius	Tidak memiliki dampak yang buruk apabila tidak dilakukan.

Tabel III.3 Deskripsi Kriteria *Growth*

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat Memburuk Cepat	Isu sangat cepat memburuk apabila tidak segera diberikan solusi.
4	Cepat Memburuk	Isu cepat memburuk apabila tidak segera diberikan solusi.
3	Cukup Memburuk Cepat	Isu bisa memburuk apabila tidak segera diberikan solusi.

2	Kurang Cepat Memburuk	Isu tidak terlalu cepat memburuk apabila tidak segera diberikan solusi.
1	Tidak Cepat Memburuk	Isu tidak cepat memburuk apabila tidak segera diberikan solusi.

Berikut tabel skala prioritas untuk menilai dan menentukan isu yang akan ditetapkan sebagai *core issue*:

Tabel III.4 Tabel Penentuan Isu Prioritas

No	Isu	Urgency	Seriousness	Growth	Total Skor Nilai
1	Belum Adanya Kesamaan Persepsi Antar Analis Media Terhadap Penentuan dan Pemilihan Isu Yang Akan Dijadikan Rekomendasi Isu Aktual.	5	4	3	12
2	Belum Seluruh Pihak Terkait, Memberikan <i>Feedback</i> Terhadap Pengiriman Hasil Analisis Media Melalui <i>SMS Gateway</i> Sebagai Pola Pelayanan Elektronik.	4	3	3	10
3	Belum Ada Sistem yang Dapat Merekap Seluruh Hasil Analis Media (Bank Data), Khususnya Rekomendasi Isu Aktual.	3	3	3	9

Catatan: Setiap kriteria diberikan skor nilai 1-5, dimana angka lima berarti sangat.

Berdasarkan pemilihan isu dengan metode USG tersebut, maka untuk finalisasi isu yang akan saya tetapkan adalah isu nomor satu, yaitu **belum adanya kesamaan persepsi antar analis media terhadap penentuan dan pemilihan isu yang akan dijadikan rekomendasi isu aktual**. Menurut saya, isu tersebut ke depannya juga akan terkait dengan penerapan prinsip Manajemen Aparatur Sipil Negara (MASN) yaitu dengan melihat kewajiban analis media untuk

menjalankan tugas secara cermat dan bertanggung jawab, prinsip *Whole of Government* (WoG) yaitu implementasinya nanti membutuhkan koordinasi yang baik dengan sesama rekan-rekan analis media (internal), serta penerapan prinsip Pelayanan Publik, karena nanti ke depannya *output* dari hasil analisis media diharapkan dapat lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan produk pelayanan berupa hasil analisis media kepada seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* kinerja dewan.

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Berdasarkan isu yang saya angkat tersebut, maka saya berencana membuat gagasan atau solusi untuk memperbaiki dan mengatasi isu yang saya angkat, yaitu membuat pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual guna lebih mengefisiensikan kinerja analis media, khususnya dalam menentukan isu untuk rekomendasi isu aktual.

Analisis Metode Analisis SWOT

Analisis kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) atau Analisis SWOT adalah metode yang bertujuan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis rencana atau gagasan untuk memperbaiki isu yang akan diangkat tersebut, yaitu membuat pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual. Untuk itu, berikut paparan SWOT penulis untuk mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi rencana untuk membuat pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual.

Tabel III.5 Analisis SWOT

<p>Strengths</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual dapat mempermudah kinerja analis media dalam menentukan dan menetapkan isu-isu berita yang akan diangkat dalam penulisan rekomendasi isu aktual; - Penyusunan rekomendasi isu aktual menjadi lebih terarah dan jelas; - Kinerja analis media menjadi lebih efektif dan efisien; - Meminimalisir adanya rekomendasi isu aktual yang <i>didrop</i> atau dihapus oleh atasan. 	<p>Weakness</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rekomendasi isu aktual menjadi lebih terbatas, karena harus menyesuaikan dengan lingkup yang telah ditetapkan dalam pedoman; - Analis Media harus melakukan penyesuaian kembali dengan pedoman yang akan dibuat.
<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesempatan untuk mengasah dan mempertajam hasil rekomendasi; - Setjen DPR RI dan Anggota Dewan mendukung berkembangnya analis media, salah satunya melalui Program <i>Quick Wins</i> Setjen DPR RI. 	<p>Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pedoman analisis di instansi atau lembaga lain yang terlihat lebih beragam atau memiliki kualifikasi yang berbeda, jika dibandingkan dengan pedoman pemilihan isu untuk penyusunan rekomendasi isu aktual; - Adanya perubahan struktur organisasi Anggota Dewan setiap lima tahun sekali, mengingat kinerja analis media sebagai <i>supporting system</i> kinerja dewan yang harus terus melakukan penyesuaian.

Melalui tabel tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu pentingnya analis media untuk melakukan pekerjaan, khususnya dalam penulisan rekomendasi isu aktual, secara lebih jelas dan terarah. Walaupun ke depannya, dengan adanya pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual, maka seluruh analis media harus melakukan penyesuaian kapabilitas atau kemampuan yang telah ditetapkan dalam pedoman tersebut. Analis media juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan

mengasah kemampuan lebih dalam, sehingga dapat mempertajam dan meningkatkan kualitas hasil penyusunan rekomendasi isu aktual.

Selain itu, kinerja analis media ini didukung oleh Setjen DPR RI, salah satunya melalui program *Quick Wins*, dan juga oleh seluruh Anggota Dewan, sehingga penting untuk menghasilkan *output* atau produk pelayanan yang berkualitas. Namun demikian, analis media juga dituntut untuk terus melakukan penyesuaian dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi anggota dewan setiap lima tahun sekali, mengingat kinerja analis media sebagai *supporting system* kinerja dewan.

Dampak yang akan Terjadi jika Isu Tidak Segera Diselesaikan

Jika pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual tidak segera dibuat, maka dikhawatirkan kinerja analis media ke depannya cenderung dilakukan berdasarkan subjektifitas analis, khususnya dalam pemilihan isu untuk penyusunan rekomendasi isu aktual. Tanpa adanya standar baku pedoman yang mutlak, hasil atau *output* dari rekomendasi isu aktual dapat berdampak pada perbedaan pemahaman antar satu analis media dengan analis media lainnya, yang dapat berdampak pada adanya pihak yang setuju dan tidak setuju dengan isu yang diangkat atau dipilih dalam penyusunan rekomendasi isu aktual.

Selain itu, dalam melakukan klasifikasi isu, juga dapat memakan waktu lebih lama dikarenakan diperlukan kesepakatan secara informal terlebih dahulu, serta setelah dikoreksi oleh atasan, dari sejumlah isu yang telah dipilih dan dibuat menjadi rekomendasi isu aktual, masih ada potensi untuk sebuah rekomendasi *didrop* atau tidak jadi dibuat rekomendasinya.

Oleh karena itu, keberadaan pedoman tersebut menjadi penting dan prioritas, dikarenakan dapat mencegah adanya hal-hal atau poin-poin yang tidak sesuai untuk dijadikan suatu rekomendasi maupun analisis media dikarenakan

perbedaan pemahaman atau interpretasi antara satu analis dengan analis lainnya.

Rekomendasi Penyelesaian

Berikut alternatif solusi yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi potensi dampak dari isu:

1. **Membuat Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual.**

Pedoman tersebut nantinya akan memuat mengenai klasifikasi dan strategi pemilihan isu yang tepat untuk diangkat menjadi sebuah rekomendasi isu aktual;

2. **Melakukan Sosialisasi, Edukasi, dan Pelatihan Untuk Memilih Isu yang Diangkat Menjadi Rekomendasi Isu Aktual**

Pemilihan isu yang dilakukan oleh analis media telah disesuaikan dengan pedoman yang akan dibuat, sehingga ke depannya analis media dapat memiliki pemahaman yang sama dan sesuai dengan substansi dari pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.

Kedua rekomendasi tersebut diharapkan dapat mengatasi isu yang telah diangkat oleh penulis sebagai isu prioritas, sehingga ke depannya seluruh analis media dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap pemilihan isu untuk penulisan rekomendasi isu aktual, serta memahami indikator-indikator apa saja yang memenuhi syarat sebuah isu atau berita layak dan tepat diangkat menjadi rekomendasi isu aktual.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

- Unit Kerja** : Subbagian Analisis Media.
- Identifikasi Isu** : 1. Belum Adanya Kesamaan Persepsi Antar Analisis Media Terhadap Penentuan dan Pemilihan Isu Yang Akan Dijadikan Rekomendasi Isu Aktual;
2. Belum Seluruh Pihak Terkait, Memberikan *Feedback* Terhadap Pengiriman Hasil Analisis Media Melalui SMS *Gateway* Sebagai Pola Pelayanan Elektronik;
3. Belum Ada Sistem Yang Dapat Merekap Seluruh Hasil Analisis Media (Bank Data), Khususnya Rekomendasi Isu Aktual, Sehingga Dapat Mempermudah Pencarian Isu-Isu Yang Pernah Dibuat Sebelumnya.
- Isu yang Diangkat** : Belum Adanya Kesamaan Persepsi Antar Analisis Media Terhadap Penentuan dan Pemilihan Isu Yang Akan Dijadikan Rekomendasi Isu Aktual.
- Gagasan Pemecahan Isu** : Pembuatan Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual.

Tabel IV.1 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

a. Jangka Pendek

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Menyampaikan usulan pembuatan pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual kepada Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analisis Media.	<ol style="list-style-type: none"> Mengagendakan pertemuan dengan Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media rekan kerja, dan rekan-rekan kerja analis media; Membuat surat pertemuan atau rapat dengan Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media rekan kerja, dan rekan-rekan kerja analis media; Penyampaian usulan rancangan aktualisasi; Membuat notulensi atau hasil rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> Tersosialisasikan maksud dan tujuan rancangan aktualisasi; Terwujudnya persepsi yang sama mengenai tujuan dari rancangan aktualisasi yang dibuat oleh penulis; Terbangunnya komitmen bersama untuk dapat mewujudkan pembuatan pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual; Surat pertemuan atau rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas, yaitu aktif dalam melaporkan gagasan dan rencana kinerja yang akan digagas; Nilai Nasionalisme, yaitu mengedepankan musyawarah dan diskusi dalam mensosialisasikan rencana kinerja; Nilai Etika Publik, yaitu dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana pembuatan analisis media kepada atasan dan rekan-rekan analis media; <i>Whole of Government</i>, yaitu mengintegrasikan pihak-pihak yang terlibat dalam analisis media agar implementasi 	<p>Pelaksanaan aktualisasi ini sejalan dengan tugas Biro Pemberitaan Parlemen yaitu menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Dalam hal ini, Subbagian Analisis Media secara spesifik mempunyai tugas melakukan analisis media dan pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial. Selain itu, pelaksanaan aktualisasi juga</p>	<p>Religius: Dalam setiap kegiatan dan aktifitas yang dilakukan, tidak melupakan ibadah, serta berperilaku sesuai dengan ajaran agama, seperti bertanggungjawab dan jujur dalam melakukan setiap kegiatan.</p> <p>Akuntabilitas: Bertanggung jawab penuh terhadap proses dan keberhasilan pelaksanaan rancangan aktualisasi.</p> <p>Profesional: Rancangan aktualisasi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan,</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
				rancangan aktualisasi dapat berjalan maksimal.	selaras dengan visi Setjen DPR RI yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 yaitu "Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."	kemampuan, dan kompetensi diri.
2	Membuat draft pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun tahapan pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual; 2. Menyusun strategi pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual. 	<i>Draft</i> I Panduan Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam membuat penentuan substansi dalam pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual; 2. Nilai Komitmen Mutu, yaitu menetapkan panduan yang dapat mengefisienkan kinerja analis media dalam penyusunan rekomendasi isu aktual; 3. Nilai Pelayanan Publik, yaitu telah menetapkan salah satu standar pelayanan, guna menghasilkan <i>output</i> rekomendasi yang lebih berkualitas. 		<p>Integritas: Totalitas dan konsisten untuk mengimplementasikan rancangan aktualisasi yang telah dibuat, serta melakukannya dengan mengedepankan prinsip etika dan moral.</p>
3	Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan Kasubbag	1. Mengagendakan pertemuan dengan Kasubbag dan rekan kerja;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pertemuan atau rapat; 2. Notulensi hasil forum. 	1. Nilai Nasionalisme, yaitu dengan cara melakukan forum dengar pendapat dan		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
	<p>Analisis Media dan rekan kerja Analisis Media yang lain untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat surat pertemuan atau rapat dengan Kasubbag dan Rekan Kerja; 3. Berdiskusi bersama rekan kerja analisis media; 4. Menerima masukan, kritik, dan saran dari rekan-rekan analisis media terhadap pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual; 5. Mencatat hasil diskusi. 		<ol style="list-style-type: none"> menerima masukan dengan cara bermusyawarah, sehingga didapat pedoman yang telah disepakati bersama; 2. Nilai Komitmen Mutu, mengingat pedoman akan dilakukan dan diimplementasikan bersama rekan-rekan analisis media lainnya, agar pelaksanaannya efektif, maka penting untuk mendapatkan masukan dari sesama analisis media; 3. Nilai Anti Korupsi, yaitu rapat dilakukan tepat waktu dan tidak mengganggu waktu pekerjaan lain, serta hasil notulensi akan dicatat secara elektronik guna menghemat penggunaan kertas 4. <i>Whole of Government</i>, yaitu berkoordinasi 		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
				dengan pihak-pihak yang terlibat dalam analisis media agar implementasi rancangan aktualisasi dapat berjalan maksimal.		
4	Revisi Draft Pedoman sesuai hasil diskusi bersama Kasubbag dan Rekan Kerja Analisis Media, guna memastikan pedoman tersebut mempermudah kinerja analisis media.	Memeriksa ulang substansi dan teknis draft pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual, baik dari penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, <i>typo</i> atau salah ketik, dan urutan tahapan serta strategi, agar pedoman mudah dipahami dan diimplementasikan.	<i>Draft Final</i> Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas, yaitu memastikan dan bertanggungjawab terhadap pedoman yang telah dibuat; 2. Nilai Komitmen Mutu, yaitu menunjukkan bahwa pedoman yang dibuat bertujuan untuk mendukung dengan mempermudah kinerja Subbagian Analisis Media di Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI dan sebagai salah satu upaya meningkatkan citra positif DPR RI di mata masyarakat. 		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
5	Uji coba atau implementasi pedoman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur strategi pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual; 2. Melaksanakan pembuatan rekomendasi isu aktual berdasarkan pedoman. 	Hasil uji coba (berupa rekomendasi isu aktual).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Komitmen Mutu, untuk mengetahui bagaimana efisiensi dan efektifitas apabila pedoman tersebut diterapkan; 2. Nilai Anti Korupsi, yaitu tidak menunda-nunda pelaksanaan penerapan pedoman analisis media; 3. Nilai Manajemen ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan bersama; 4. Nilai Pelayanan Publik, yaitu pembuatan rekomendasi ini bertujuan untuk dikirimkan kepada seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat DPR RI guna mendapatkan informasi terkait pemberitaan maupun isu-isu yang sedang berkembang. 		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
6	Monitoring dan Evaluasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengagendakan rapat evaluasi bersama Kepala Subbagian Analisis Media dan rekan kerja analis media; 2. Membuat surat rapat evaluasi; 3. Mereview akhir hasil pelaksanaan pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual; 4. Mencatat hal-hal yang masih perlu menjadi perbaikan dan evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rapat evaluasi; 2. Notulensi hasil rapat evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas, yaitu dengan cara mengevaluasi kinerja analisis media selama menerapkan pedoman analisis media, serta cara bertanggung jawab terhadap implementasi dari penerapan pedoman yang telah dibuat; 2. Nilai Nasionalisme, yaitu melakukan diskusi secara bersama-sama dengan rekan kerja dan atasan; 3. Nilai Komitmen Mutu, yaitu dengan meningkatkan dan memperbaiki kualitas dan kinerja yang masih perlu menjadi perhatian; 4. Nilai Anti Korupsi, yaitu secara terbuka menyampaikan hasil yang telah dilakukan bersama; 		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
				5. Manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas ASN dengan jujur dan bertanggung jawab; 6. <i>Whole of Government</i> , yaitu adanya koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dan terkait dalam pengerjaan analisis media, sehingga melalui evaluasi ini ke depannya dapat dilakukan pengembangan strategi.		
7	Membuat laporan akhir	1. Mengumpulkan data-data dan dokumentasi selama mengimplementasikan rancangan aktualisasi; 2. Menyusun konsep laporan akhir rancangan aktualisasi;	1. Data-data implementasi rancangan aktualisasi; 2. Laporan Akhir Rancangan Aktualisasi.	1. Nilai Akuntabilitas, yaitu bertanggungjawab dalam membuat laporan kegiatan; 2. Nilai Komitmen Mutu, yaitu memastikan laporan yang dibuat berkualitas dan sesuai dengan data lapangan; 3. Nilai Anti Korupsi, yaitu mengerjakan laporan akhir tepat waktu, jujur,		

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
		3. Menentukan kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan rancangan aktualisasi; 4. Membuat laporan akhir rancangan aktualisasi.		dan mengoptimalkan penggunaan printer dan kertas kantor.		

b. Jangka Menengah

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
1	Mengoptimalkan implementasi pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.		Rekomendasi Isu Aktual sesuai dengan pedoman.
2	Evaluasi dan <i>Monitoring</i>	Melakukan monitoring dan evaluasi	<i>Draft</i> Laporan Evaluasi dan <i>Monitoring</i>

c. Jangka Panjang

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
1	Semakin terarahnya pemilihan isu yang berdampak pada semakin cepatnya penentuan isu dan penyusunan rekomendasi, sehingga mendukung program <i>Quick Wins</i> Setjen DPR RI.		<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Isu Aktual menggunakan isu-isu yang berdampak secara nasional;2. Pengiriman Hasil Analisis Media dapat sesuai dengan target <i>Quick Wins</i> Setjen DPR RI.
2	Evaluasi dan <i>Monitoring</i>	Melakukan monitoring dan evaluasi.	<i>Draft</i> Laporan Evaluasi dan <i>Monitoring</i>

B. Stakeholder

Stakeholder pada Rancangan Aktualisasi Pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dibagi menjadi dua, yaitu *stakeholder* Internal dan *stakeholder* eksternal. Berikut penjelasan mengenai kedua *stakeholder* tersebut:

Stakeholder internal yaitu terdiri dari:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
2. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
3. Kepala Subbagian Analisis Media
4. Kepala Subbagian Media Cetak dan Website
5. Kepala Subbagian Media Sosial
6. Staf Analisis Media

Stakeholder eksternal yaitu terdiri dari:

1. Pimpinan dan Anggota DPR RI
2. Sekretaris Jenderal DPR RI
3. Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan identifikasi *stakeholder* tersebut, dapat dianalisis bagaimana aktor-aktor terkait berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi rancangan aktualisasi yang diajukan oleh penulis. Keberhasilan implementasi suatu kegiatan, menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Berikut penjelasan mengenai kedua variabel tersebut:

1. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*) Mencakup Hal-Hal Berikut:

- a. Kepentingan yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan**
Pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual ke depannya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

b. Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan

Manfaat dari penyusunan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual yaitu memudahkan analisis media dalam menentukan isu dalam penyusunan rekomendasi dan penyusunan rekomendasi itu sendiri, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan acuan bagi Anggota DPR dan Pimpinan DPR dalam memberikan pernyataan kepada media ataupun menanggapi isu-isu aktual yang sedang berkembang di media massa saat ini. Dengan menyampaikan rekomendasi yang tepat, maka dewan dapat meningkatkan citra positif DPR di kalangan masyarakat.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Dengan adanya pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual, seluruh Analisis Media diharapkan melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pedoman.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan saat ini berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), oleh karena itu rancangan aktualisasi membutuhkan verifikasi, koreksi, dan dukungan dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Kepala Subbagian Analisis Media, Kepala Subbagian Media Cetak dan Website, Kepala Subbagian Media Sosial, dan seluruh rekan kerja analisis media.

e. (Siapa) Pelaksana Program

Pelaksana program atau rancangan aktualisasi adalah seluruh Tim Analisis Media DPR RI.

f. Sumber Daya yang Dihasilkan

Sumber daya yang dihasilkan berupa rekomendasi isu aktual.

2. Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*) Mencakup Hal-Hal Berikut:

a. **Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan dalam rancangan aktualisasi pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual, serta penunjukan pihak-pihak yang ditugasi untuk mengimplementasikan pedoman, dapat mempengaruhi perwujudan dari optimalisasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, untuk mewujudkan citra positif DPR, maka penyusunan rekomendasi oleh analis media untuk Pimpinan DPR dan Anggota DPR yang telah diverifikasi oleh atasan internal, menjadi hal yang penting, mengingat dalam hal ini aktor utama yang menggunakan rekomendasi secara langsung, yakni anggota dewan, memiliki kuasa atau pengaruh yang cukup besar sebagai anggota legislatif negara.

b. **Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Rancangan Aktualisasi Pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilihan isu dalam rekomendasi isu aktual yang ditujukan bagi Pimpinan DPR dan Anggota DPR sebagai anggota legislatif negara.

c. **Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Setiap analis media, sebagai pelaksana rancangan aktualisasi, harus dapat mematuhi, memahami, dan menerapkan Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual secara optimal.

C. **Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala**

Dalam mengimplementasikan rancangan aktualisasi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sejumlah kendala yang harus dihadapi

dan diselesaikan. Berdasarkan pemaparan pada teknik analisis berupa SWOT pada bab III, terdapat dua kelemahan yang berpotensi menjadi kendala selama pelaksanaan rancangan aktualisasi.

Pertama, yaitu penyusunan rekomendasi isu aktual berpotensi menjadi lebih terbatas, karena harus menyesuaikan dengan lingkup yang telah ditetapkan dalam pedoman. Analisis Media mungkin akan mengalami kendala dalam mempertimbangkan isu yang dapat diangkat, seperti isu regional namun memiliki dampak nasional. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, isi dari pedoman pemilihan isu harus benar-benar dapat dipahami, karena seharusnya pedoman tersebut mempermudah analisis media dalam menentukan isu. Sosialisasi dan penyampaian yang tepat dan detail terkait isi pedoman harus dilakukan sejak awal, agar pedoman dapat dipahami dan diterapkan secara efektif dan efisien.

Kendala kedua yang mungkin dihadapi adalah, analisis media harus melakukan penyesuaian kembali dengan pedoman yang dibuat, dikarenakan dalam keseharian sebelumnya, analisis media terbiasa untuk memilih isu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Oleh karena itu, sebelum menentukan isu yang akan diangkat, analisis media dapat berdiskusi dengan sesama rekan kerja, atau di tingkat kesulitan yang lebih tinggi dapat bertanya kepada atasan.

Kendala lainnya yang berpotensi timbul adalah adanya kemungkinan permintaan sebuah isu dinaikkan oleh anggota dewan, namun isu yang diminta untuk dinaikkan tersebut tidak berskala nasional atau tidak sesuai pedoman. Untuk mengatasi hal tersebut, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menyampaikan kepada anggota dewan terkait bahwa permintaan isu tersebut tidak sesuai pedoman, dan kedua yaitu menganalisis dan mencari data isu tersebut agar dapat ditingkatkan menjadi skala yang lebih nasional. Namun, yang paling terpenting adalah dalam setiap penyusunan rekomendasi isu aktual harus mendapatkan persetujuan dari atasan.

D. Analisis Dampak

Dampak dari pelaksanaan rancangan aktualisasi pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual dapat mempermudah kinerja analis media dalam menentukan dan menetapkan isu-isu berita yang akan diangkat dalam penulisan rekomendasi isu aktual. Selain itu, dengan memahami dan menerapkan pedoman tersebut, maka diharapkan penyusunan rekomendasi isu aktual menjadi lebih terarah dan jelas, serta meminimalisir adanya rekomendasi isu aktual yang *didrop* atau diminta untuk dihapus oleh atasan. Pedoman tersebut juga akan berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi isu aktual yang dibuat, mengingat rekomendasi diharapkan dapat membantu Pimpinan dan Anggota Dewan ketika didoorstop oleh wartawan dan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan citra DPR.

Namun, apabila Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual tersebut tidak dilaksanakan, akan berdampak pada masih terjadinya subjektifitas atau perbedaan persepsi mengenai pemilihan isu dalam rekomendasi isu aktual. Selain itu, dalam melakukan klasifikasi isu, juga akan memakan waktu lebih lama dikarenakan memerlukan kesepakatan secara informal terlebih dahulu, baik ke sesama rekan kerja maupun atasan. Terakhir, setelah dikoreksi oleh atasan, dari sejumlah isu yang telah dipilih dan dibuat, masih adanyapotensi sejumlah isu ataupun hasil analisis media yang *didrop* atau tidak jadi dibuat rekomendasinya.

E. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel IV. 2 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Menyampaikan usulan pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual kepada Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analis Media.												
	Tahapan 1: Mengagendakan pertemuan dengan Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media rekan kerja, dan rekan-rekan kerja analis media.												
	Tahapan 2: Membuat surat pertemuan atau rapat dengan Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media rekan kerja, dan rekan-rekan kerja analis media.												
	Tahapan 3: Penyampaian usulan rancangan aktualisasi.												
	Tahapan 4: Membuat notulensi atau hasil rapat.												
2.	Membuat <i>draft</i> pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.												
	Tahapan 1: Menyusun tahapan pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.												
	Tahapan 2: Menyusun strategi pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.												
3.	Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Kasubbag Analisis Media dan rekan kerja Analis Media yang lain untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.												
	Tahapan 1: Mengagendakan pertemuan dengan Kasubbag dan rekan kerja.												
	Tahapan 2: Membuat surat pertemuan atau rapat dengan Kasubbag dan Rekan Kerja.												
	Tahapan 3: Berdiskusi bersama rekan kerja analis media.												
	Tahapan 4: Menerima masukan, kritik, dan saran dari rekan-rekan analis media terhadap pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.												
	Tahapan 5: Mencatat hasil diskusi.												
4	Revisi Draft Pedoman sesuai hasil diskusi bersama Kasubbag dan Rekan Kerja Analis Media, guna memastikan pedoman tersebut mempermudah kinerja analis media.												
	Tahapan: Memeriksa ulang substansi dan teknis draft pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual, baik dari penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, <i>typo</i> atau salah ketik, dan urutan tahapan serta strategi, agar pedoman mudah dipahami dan diimplementasikan.												
5	Uji coba atau implementasi pedoman.												
	Tahapan 1:												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Mengatur strategi pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.												
	Tahapan 2: Melaksanakan penyusunan rekomendasi isu aktual berdasarkan pedoman.												
6	Monitoring dan Evaluasi.												
	Tahapan 1: Mengagendakan rapat evaluasi bersama Kepala Subbagian Analisis Media dan rekan kerja analisis media.												
	Tahapan 2: Membuat surat rapat evaluasi;												
	Tahapan 3: Mereview akhir hasil pelaksanaan pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual;												
	Tahapan 4: Mencatat hal-hal yang masih perlu menjadi perbaikan dan evaluasi..												
7	Membuat laporan akhir												
	Tahapan 1: Mengumpulkan data-data dan dokumentasi selama mengimplementasikan rancangan aktualisasi.												
	Tahapan 2: Menyusun konsep laporan akhir rancangan aktualisasi.												
	Tahapan 3: Menentukan kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan rancangan aktualisasi.												
	Tahapan 4: Membuat laporan akhir rancangan aktualisasi.												

BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Jadwal kegiatan aktualisasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal awal yang telah ditetapkan oleh penulis. Akan tetapi, di tengah berjalannya pelaksanaan aktualisasi, penulis menambah beberapa kegiatan guna mendukung terbentuknya Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual yang lebih baik

Tabel V.1 Matriks Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Menyampaikan usulan pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual kepada Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analisis Media.									Kegiatan 1 berjalan lancar sesuai dengan rencana awal. Kegiatan dilakukan pada minggu kedua Mei 2021 dikarenakan minggu pertama Mei terdapat libur Lebaran.
	Tahapan 1: Mengagendakan pertemuan dengan Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media rekan kerja, dan rekan-rekan kerja analisis media.									

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	Tahapan 2: Penyampaian usulan rancangan aktualisasi.									
	Tahapan 3: Membuat review atau laporan singkat (lapsing) dan <i>form</i> absensi.									
2.	Membuat <i>draft</i> pedoman									Kegiatan 2 berjalan lancar sesuai rencana di Rancangan Aktualisasi.
	Tahapan 1: Mencari data terkait bahan pedoman.									
	Tahapan 2: Menyusun tahapan dan strategi pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual									
3.	Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan Kasubbag Analisis Media dan rekan kerja Analis Media yang lain untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.									Kegiatan 3 berjalan lancar sesuai rencana di Rancangan Aktualisasi.
	Tahapan 1: Mengagendakan pertemuan dengan Kasubbag dan rekan kerja.									

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	Tahapan 2: Melakukan diskusi terkait masukan untuk Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual									
	Tahapan 3: Membuat review atau laporan singkat (lapsing) dan <i>form</i> absensi.									
4	Revisi Draft Pedoman sesuai hasil diskusi bersama Kasubbag dan Rekan Kerja Analis Media, guna memastikan pedoman tersebut mempermudah kinerja analis media									Kegiatan 4 berjalan lancar sesuai rencana di Rancangan Aktualisasi.
	Tahapan: Memeriksa ulang substansi dan teknis <i>draft</i> Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual, baik dari penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, <i>typo</i> atau salah ketik, dan urutan tahapan serta strategi, agar pedoman mudah dipahami dan diimplementasikan.									
5	Menyusun Draft Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual									Kegiatan 5 merupakan kegiatan tambahan dari perencanaan yang telah dibuat dalam

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	menjadi <i>Booklet</i> Pedoman									Rancangan Aktualisasi penulis. Kegiatan 5 berjalan dengan lancar, hanya hambatan penulis harus mencetak dummy secara mandiri dikarenakan waktu yang cukup pendek.
	Tahapan 1: Mencari referensi <i>booklet</i> .									
	Tahapan 2: Mengedit <i>draft</i> awal pedoman menjadi booklet dengan ukuran A5.									
	Tahapan 3: Mencetak <i>booklet</i> .									
6	Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual kepada Atasan dan Rekan Kerja									Kegiatan 6 berjalan dengan lancar.
	Tahapan 1: Mengagendakan sosialisasi kepada Kepala Subbagian Analisis Media dan rekan kerja analis media.									
	Tahapan 2: Mensosialisasikan hasil akhir pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual;									
	Tahapan 3:									

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	Membuat review atau laporan singkat (lapsing) dan <i>form</i> absensi.									
7	Uji coba atau implementasi pedoman									Kegiatan 7 berjalan dengan lancar.
	Tahapan: Menerapkan poin-poin dalam pedoman dalam penyusunan rekomendasi isu aktual									
8	Monitoring dan Evaluasi									Kegiatan 8 berjalan dengan lancar.
	Tahapan 1: Menentukan konsep monitoring dan evaluasi yang akan digunakan									
	Tahapan 2: Menggunakan <i>Google Form</i> untuk monitoring dan evaluasi Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual									
	Tahapan 3: Melakukan wawancara testimoni terhadap beberapa pihak/stakeholders terkait, baik dari sisi <i>output</i> maupun <i>outcome</i> .									
	Tahapan 4:									

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				Keterangan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	Membuat laporan akhir aktualisasi.									

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Penulis membagi seluruh tahapan-tahapan kegiatan tersebut ke dalam pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Lebih lanjut, agar tahapan kegiatan dalam aktualisasi dapat dipahami secara lebih rinci dan jelas, penulis akan memaparkan tahapan-tahapan kegiatan tersebut secara detail, yaitu sebagai berikut:

PRA PELAKSANAAN

A.1 Menyampaikan usulan pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual kepada Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analisis Media.

Sebelum penulis menjalankan rancangan aktualisasi yang telah direncanakan, penulis harus mendapatkan persetujuan atasan, dalam hal ini Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial. Untuk mendapatkan persetujuan atau izin tersebut, penulis harus dapat menyampaikan usulan pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual kepada atasan.

Dalam kegiatan ini, penulis melakukan sejumlah tahapan kegiatan, yaitu mengagendakan pertemuan dengan atasan dan rekan kerja, menyampaikan usulan rancangan aktualisasi, dan membuat lapsing. Dalam kegiatan ini, terdapat sejumlah nilai-nilai ANEKA yang dapat diterapkan, yaitu:

- Nilai akuntabilitas yaitu aktif dalam melaporkan gagasan dan rencana kinerja yang akan digagas;
- Nilai Nasionalisme, yaitu mengedepankan musyawarah dan diskusi dalam mensosialisasikan rencana kinerja;
- Nilai Etika Publik, yaitu dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual kepada atasan dan rekan-rekan analisis media;
- Whole of Government, yaitu mengintegrasikan pihak-pihak yang terlibat dalam analisis media agar implementasi rancangan aktualisasi dapat berjalan maksimal.

- a. *Mengagendakan pertemuan dengan Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media rekan kerja, dan rekan-rekan kerja analis media.*

Pertama-tama, penulis mencari waktu yang tepat untuk dapat menyampaikan usulan dilakukannya rancangan aktualisasi. Setelah disepakati bersama, pertemuan dilakukan pada Jumat, 7 Mei 2021 pukul 15.00 bertempat di Ruang Kepala Bagian Medtaksos, Gedung Nusantara II Lantai 3.



Gambar V.1 Pertemuan Dengan Kabag Medtaksos, Kasub Analis Media, dan Rekan Kerja Analis Media

- b. *Penyampaian usulan rancangan aktualisasi.*

Penulis menyampaikan usulan rancangan aktualisasi kepada Kabag Medtaksos didampingi Kasub Analis Media dan juga rekan kerja Analis Media lainnya. Penulis menyampaikan usulan pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dan disetujui oleh Kabag maupun Kasubag.

- c. *Membuat review atau laporan singkat (lapsing) dan form absensi¹*

Penulis membuat review atau lapsing sebagai catatan untuk penulis mengenai masukan-masukan yang diberikan oleh atasan maupun rekan kerja, agar pedoman dapat lebih baik. Lapsing

¹ Data Lapsing dan form absen tercantum di Lampiran 1 hal. 87

ditandatangani langsung oleh Kabag Medtaksos. Selain itu, penulis juga membuat form absensi. Secara singkat, pedoman yang dibuat oleh penulis memiliki kemungkinan jangka panjang untuk dikembangkan menjadi *Standard Operating Procedure (SOP)*. Selain itu, pedoman juga dinilai sangat penting dan bermanfaat sebagai acuan analisis media agar dapat menentukan isu secara tepat.

PELAKSANAAN

A.2 Membuat *draft* pedoman

Dalam kegiatan kedua ini, penulis membuat *draft* Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual. Kegiatan ini dilakukan pada minggu kedua Mei 2021. Penulis mencari data terkait bahan pedoman, serta menyusun tahapan dan strategi pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual.

Dalam kegiatan ini, dapat diterapkan sejumlah nilai ANEKA, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam membuat penentuan substansi dalam pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual;
- Nilai Komitmen Mutu, yaitu menetapkan panduan yang dapat mengefisienkan kinerja analisis media dalam penyusunan rekomendasi isu aktual;
- Nilai Pelayanan Publik, yaitu telah menetapkan salah satu standar pelayanan, guna menghasilkan output rekomendasi yang lebih berkualitas.

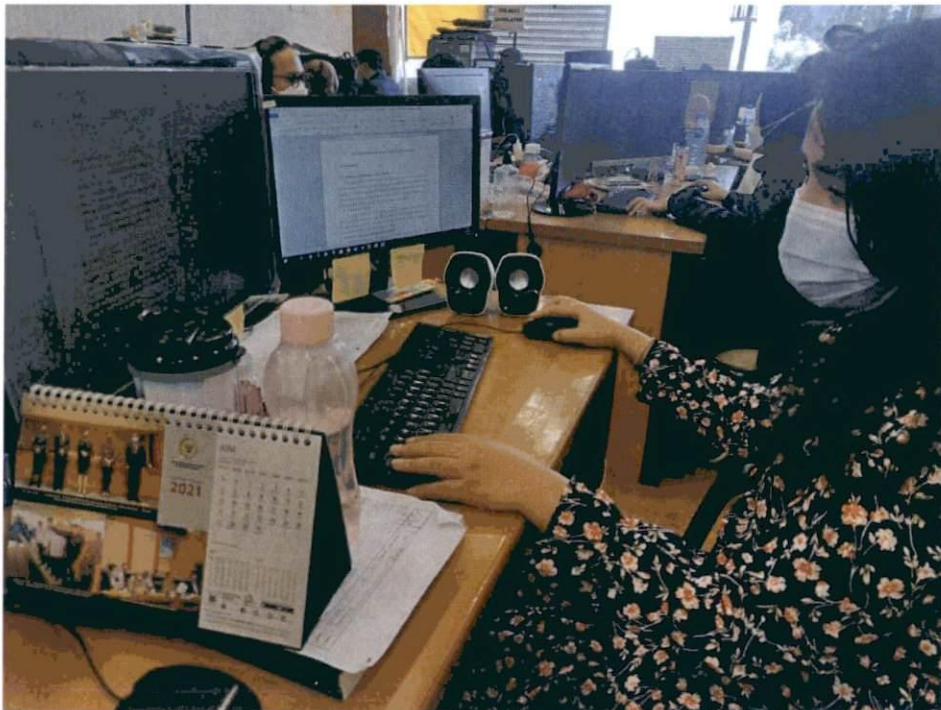
*a. Mencari data terkait bahan pedoman.*²

Penulis mencari data dari berbagai sumber untuk dijadikan acuan dalam penulisan pedoman, salah satunya adalah keterkaitan dengan nilai berita. Penulis mencari bahan-bahan melalui internet dan juga berdiskusi dengan atasan mengenai poin-poin apa saja yang harus dicantumkan dalam pedoman.

² *Draft* Pedoman tercantum di Lampiran 2 hal. 89

b. *Menyusun tahapan dan strategi pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual*

Penulis juga membuat dan Menyusun Sub Bab mengenai tahapan dan strategi pemilihan isu yang akan dicantumkan dalam pedoman. Penyusunan tahapan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam menentukan isu dalam rekomendasi isu aktual.



Gambar V.2 Membuat *Draft* Pedoman di Ruang Kerja Bagian Media Cetak dan Media Sosial

A.3 Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan Kasubbag Analisis Media dan rekan kerja Analisis Media yang lain untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.

Pada tahap kegiatan ketiga, setelah selesai membuat pedoman, penulis menyelenggarakan forum dengar pendapat bersama atasan dan rekan kerja analisis media guna mendapatkan saran dan masukan terkait substansi dari pedoman. Kegiatan ketiga dilakukan pada minggu ketiga Mei 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Media Cetak dan Media Sosial, Gedung Nusantara II Lantai 3.

Dalam kegiatan ketiga ini, terdapat nilai-nilai ANEKA yang dapat diterapkan, yaitu sebagai berikut:

- Nilai Nasionalisme, yaitu dengan cara melakukan forum dengar pendapat dan menerima masukan dengan cara bermusyawarah, sehingga didapat pedoman yang telah disepakati bersama;
- Nilai Komitmen Mutu, mengingat pedoman akan dilakukan dan diimplementasikan bersama rekan-rekan analis media lainnya, agar pelaksanaannya efektif dan efisien, maka penting untuk mendapatkan masukan dari sesama analis media;
- Nilai Anti Korupsi, yaitu rapat dilakukan tepat waktu dan tidak mengganggu waktu pekerjaan lain, serta hasil notulensi akan dicatat secara elektronik terlebih dahulu, guna menghemat penggunaan kertas;
- *Whole of Government*, yaitu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam analis media agar implementasi rancangan aktualisasi dapat berjalan maksimal.

a. *Mengagendakan pertemuan dengan Kasubbag dan rekan kerja.*

Penulis mencari waktu yang tepat untuk dapat melakukan forum dengar pendapat untuk memaparkan pedoman yang telah dibuat. Setelah disepakati bersama, pertemuan dilakukan pada Senin, 17 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.

b. *Melakukan diskusi terkait masukan untuk Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual*

Setelah menemukan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan forum dengar pendapat, penulis kemudian membuka forum diskusi guna mendapatkan masukan dan saran, khususnya dari rekan-rekan kerja analis media yang ke depannya akan menggunakan pedoman. Forum diskusi dipandu oleh penulis sendiri yang diawali dengan penjelasan mengenai substansi dari pedoman, dan diikuti oleh sesi tanya jawab dari rekan kerja analis media.



Gambar V.3 Forum Dengar Pendapat Analis Media Untuk Mendapatkan Masukan Mengenai Pedoman

- c. *Membuat review atau laporan singkat (lapsing) dan form absensi*³
Penulis membuat *review* atau *lapsing* sebagai catatan untuk penulis mengenai masukan-masukan yang diberikan oleh atasan maupun rekan kerja, agar pedoman dapat lebih baik. *Lapsing* ditandatangani oleh Kasubbag Analisis Media. Selain itu, penulis juga membuat form absensi. Secara singkat, hasil forum yaitu adanya masukan dari Kasubbag Analisis Media untuk merevisi dan menambah judul beberapa bagian, seperti Teknik dan Strategi Penentuan Isu dan Teknik dan Strategi Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual. Selain itu, Kasubbag mengarahkan agar substansi penentuan isu memasukkan keterkaitan dengan nilai berita, serta perlu penambahan beberapa bagian seperti pendahuluan,

³ Data *Lapsing* dan form absen tercantum di Lampiran 3 hal. 95

pengertian rekomendasi, dan pengertian isu aktual agar lengkap dan jelas, sehingga pembaca nantinya berada di alur yang tepat ketika membaca pedoman tersebut.

Kemudian, rekan kerja analis media menyarankan agar pembuatan pedoman diharapkan dapat berdampak pada penyusunan rekomendasi yang benar-benar merupakan isu aktual dan tidak ketinggalan. Dengan adanya pedoman, rekan-rekan analis media mengharapkan agar penyusunan rekomendasi isu aktual dapat tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan. Pedoman diharapkan mudah diimplementasikan dan disajikan dalam bahasayang jelas, sehingga mempermudah kinerja analis media, khususnya dalam menentukan isu dalam rekomendasi isu aktual yang akan diangkat.

A.4 Revisi *Draft* Pedoman sesuai hasil diskusi bersama Kasubbag dan Rekan Kerja Analis Media, guna memastikan pedoman tersebut mempermudah kinerja analis media

Setelah mendapatkan masukan dari atasan dan rekan kerja, penulis kemudian memeriksa ulang substansi dan teknis *draft* Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual, baik dari penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, *typo* atau salah ketik, dan urutan tahapan serta strategi, agar pedoman mudah dipahami dan diimplementasikan. Kegiatan ini dilakukan dalam rentang waktu di minggu ketiga bulan Mei 2021.

Dalam kegiatan keempat, terdapat nilai ANEKA yang dapat diterapkan, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas, yaitu penulis memastikan dan bertanggungjawab terhadap pedoman yang telah dibuat;
- Nilai Komitmen Mutu, yaitu menunjukkan bahwa pedoman yang dibuat bertujuan untuk mendukung dengan mempermudah kinerja Subbagian Analisis Media di Biro Pemberitaan SekretariatJenderal DPR RI dan sebagai salah satu upaya meningkatkan citrapositif DPR RI di mata masyarakat.

A.5 Menyusun *Draft* Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual menjadi *Booklet* Pedoman

Kegiatan selanjutnya yaitu penulis mulai melakukan penyusunan *Booklet* Pedoman. Penyusunan *Booklet* ini dimulai dari pencarian referensi dari lembaga/instansi lain yang telah memiliki booklet, mengedit *draft* pedoman menjadi *booklet*, hingga akhirnya dicetak. Pedoman ditandatangani langsung oleh Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial. Kegiatan ini dilakukan dalam rentang waktu di minggu keempat bulan Mei 2021.

Dalam kegiatan ini, terdapat sejumlah nilai ANEKA yang dapat diterapkan, yaitu:

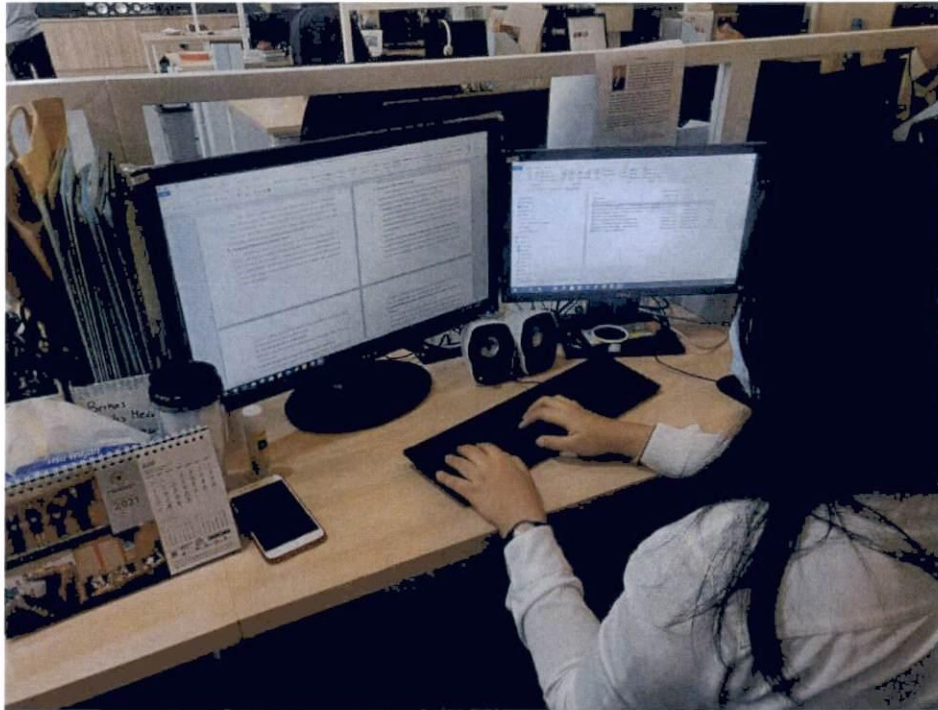
- Nilai Akuntabilitas, yaitu penulis memastikan dan bertanggungjawab terhadap pedoman yang telah dibuat, hingga akhirnya sampai kepada pembuatan *booklet*;
- Nilai Komitmen Mutu, yaitu menunjukkan bahwa pedoman yang dibuat bertujuan untuk mendukung dengan mempermudah kinerja Subbagian Analisis Media di Biro Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui bentuk fisik *booklet*, maka pedoman dapat lebih mudah dibaca;
- Nilai Anti Korupsi, yaitu penulis memastikan pencetakan *booklet* ini sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

a. Mencari referensi booklet

Penulis mencari referensi pembuatan *booklet* dari kementerian dan lembaga lain yang dilakukan melalui telusur online, serta berdiskusi dengan rekan kerja CPNS yang membuat pedoman. Sehingga diputuskan *booklet* untuk pedoman berukuran A5.

b. Mengedit draft awal pedoman menjadi booklet dengan ukuran A5.

Setelah menentukan ukuran booklet yang akan digunakan, penulis kemudian mengedit draft pedoman yang telah dibuat sebelumnya agar sesuai dengan ukuran *booklet* yang telah ditetapkan oleh penulis.



Gambar V.4 Penulis Mengedit Draft Pedoman Menjadi *Booklet* Dengan Ukuran A5

*c. Mencetak booklet.*⁴

Setelah selesai mengedit *booklet* pedoman, penulis kemudian mencetak booklet di tempat percetakan. Pencetakan *booklet* penting mengingat ke depannya setiap analis media, selain memiliki pedoman secara elektronik atau PDF, juga akan memiliki pegangan *booklet*, agar mempermudah jika ingin membaca pedoman secara langsung.

A.6 Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual kepada Atasan dan Rekan Kerja

Pada tahap kegiatan keenam, setelah *booklet* dicetak, penulis mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual kepada atasan dan juga rekan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang kerja Media Cetak dan Media Sosial, Gedung Nusantara II Lantai 3.

Dalam kegiatan keenam ini, penulis juga dapat menerapkan sejumlah nilai ANEKA, yaitu sebagai berikut:

⁴ Booklet Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dalam Lampiran 4 hal. 97

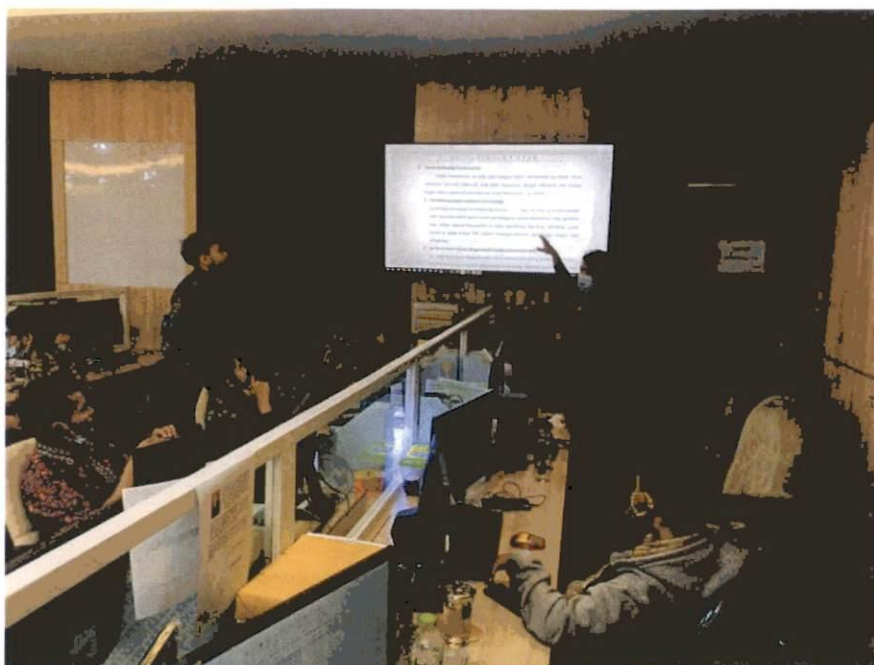
- Nilai Nasionalisme, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada atasan maupun rekan kerja, sehingga pedoman dapat diikuti dan disepakati bersama;
- Nilai Komitmen Mutu, mengingat pedoman akan dilakukan dan diimplementasikan bersama rekan-rekan analis media lainnya, agar pelaksanaannya efektif dan efisien, maka penting untuk disosialisasikan;
- Nilai Anti Korupsi, yaitu rapat dilakukan tepat waktu dan tidak mengganggu waktu pekerjaan lain, serta hasil notulensi atau lapsing akan dicatat secara elektronik terlebih dahulu, guna menghemat penggunaan kertas;
- *Whole of Government*, yaitu adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam analis media agar pedoman dapat diimplementasikan secara maksimal.

a. *Mengagendakan sosialisasi kepada Kepala Subbagian Analisis Media dan rekan kerja analis media;*

Penulis mencari waktu yang tepat untuk dapat melakukan sosialisasi, guna menginformasikan kepada rekan kerja mengenai Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual. Setelah disepakati bersama, pertemuan dilakukan pada Jumat, 4 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

b. *Mensosialisasikan hasil akhir Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual*

Kemudian, penulis mensosialisasikan pedoman kepada atasan dan juga rekan kerja analis media, agar ke depannya pedoman dapat mulai diterapkan karena memasuki masa uji coba pengimplementasian pedoman. Sosialisasi ini dilakukan melalui presentasi singkat kepada rekan kerja analis media.



Gambar V.5 Penulis Mensosialisasikan Pedoman Kepada Rekan Kerja



Gambar V.6 Penulis Mensosialisasikan Pedoman Kepada Kasubbag Analis Media (dalam bentuk PDF)

- c. Membuat review atau laporan singkat (*lapsing*) dan *form* absensi.⁵ Penulis membuat *review* atau *lapsing* sebagai catatan dan masukan akhir untuk pengimplementasian pedoman, mengingat pedoman sudah harus dapat diterapkan dalam waktu dekat. *Lapsing* ditandatangani oleh Kasubbag Analisis Media. Selain itu, penulis juga membuat *form* absensi. Secara singkat, masukan dari rekan kerja yaitu penjelasan setiap pointer agar dapat diperkuat, serta masukan dari Kasubbag yaitu penambahan Sub Bab mengenai langkah-langkah penyusunan rekomendasi isu aktual dan penutup.

A.7 Uji coba atau implementasi pedoman⁶

Setelah selesai melakukan kegiatan sosialisasi, berikutnya yaitu memasuki kegiatan uji coba atau implementasi pedoman dalam pekerjaan sehari-hari. Setiap analis media yang sedang mendapatkan penugasan untuk membuat rekomendasi isu aktual, agar dapat menerapkan poin-poin yang tercantum dalam pedoman. Kegiatan ini dilakukan selama tujuh hari kerja, yaitu pada tanggal 9 -17 Juni 2021.

Dalam kegiatan ketujuh ini, penulis dapat menerapkan sejumlah nilai ANEKA, yaitu sebagai berikut:

- Nilai Komitmen Mutu, untuk mengetahui bagaimana efisiensi dan efektifitas apabila pedoman tersebut diterapkan;
- Nilai Anti Korupsi, yaitu tidak menunda-nunda pelaksanaan penerapan pedoman analisis media;
- Nilai Manajemen ASN, yaitu melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan bersama;
- Nilai Pelayanan Publik, yaitu penyusunan rekomendasi ini bertujuan untuk dikirimkan kepada seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat DPR RI guna mendapatkan

⁵ Data *Lapsing* dan *form* absen tercantum di Lampiran 5 hal. 116

⁶ Hasil Uji Coba Rekomendasi 9-17 Juni 2021 terlampir dalam Lampiran 6 hal. 118

informasi terkait pemberitaan maupun isu-isu yang sedang berkembang.

PASCA PELAKSANAAN

A.8 Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Tahap terakhir dalam kegiatan laporan aktualisasi ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi sebagai salah satu upaya untuk dapat mengukur keberhasilan dan kebermanfaat pelaksanaan aktualisasi yang diajukan oleh penulis. Dalam kegiatan ini, penulis dapat menerapkan sejumlah nilai ANEKA, yaitu:

- Nilai Akuntabilitas, yaitu dengan cara mengevaluasi kinerja analisis media selama menerapkan pedoman analisis media, serta cara bertanggung jawab terhadap implementasi dari penerapan pedoman yang telah dibuat;
- Nilai Nasionalisme, yaitu melakukan diskusi secara bersama-sama dengan rekan kerja dan atasan;
- Nilai Komitmen Mutu, yaitu dengan meningkatkan dan memperbaiki kualitas dan kinerja yang masih perlu menjadi perhatian;
- Nilai Anti Korupsi, yaitu secara terbuka menyampaikan hasil yang telah dilakukan bersama;
- Manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugas ASN dengan jujur dan bertanggung jawab;
- *Whole of Government*, yaitu adanya koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dan terkait dalam pengerjaan analisis media, sehingga melalui evaluasi ini ke depannya dapat dilakukan pengembangan strategi.

- a. *Menentukan konsep monitoring dan evaluasi yang akan digunakan*
Penulis menentukan konsep monev yang akan dilakukan untuk memonitoring dan mengevaluasi pengimplementasian Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual. Penulis menetapkan

menggunakan metode google form agar data yang didapat tersusun rapih dan bersifat terarah.

b. Menggunakan *Google Form* untuk monitoring dan evaluasi Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Penulis membuat indikator-indikator evaluasi dalam google form, dan menyebarkan form *Google Form* kepada rekan-rekan kerja analis media melalui chat whatsapp.



Gambar V.7 Salah Satu Tangkapan Layar Penulis Menyebarkan Kuisiner Google Form Kepada Rekan Kerja Analis Media

Survei Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Terima kasih telah bersedia membuka laman ini. Mohon Saudara dapat mengisi beberapa kuisisioner berikut ini sesuai dengan jawaban Saudara.

* Required

Nama *

Your answer

Jabatan *

Your answer

Seberapa perlukah keberadaan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual? *

- Sangat Perlu
- Perlu
- Kurang Perlu
- Tidak Perlu
- Sangat Tidak Perlu

Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual mudah dimengerti? *

- Ya
- Kurang
- Tidak

Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual bermanfaat bagi Saudara? *

- Ya
- Kurang
- Tidak

Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual mempermudah Saudara dalam menentukan isu yang akan diangkat menjadi sebuah rekomendasi? *

- Ya
- Kurang
- Tidak

Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual mempermudah Saudara dalam memahami strategi penyusunan rekomendasi isu aktual?

- Ya
- Kurang
- Tidak

Apakah anda memahami langkah-langkah penyusunan rekomendasi dalam Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual?

- Ya
- Kurang
- Tidak

Apakah menurut Saudara, Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dapat meningkatkan efisiensi kinerja Subbagian Analisis Media? *

Ya

Mungkin

Tidak

Apakah ada kesulitan atau hambatan selama mengikuti Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual? (Jika ada, tuliskan kesulitan atau hambatan Saudara)

Your answer

Masukan dan Saran untuk Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual *

Your answer

Submit

Gambar V.8 Daftar Pertanyaan Pada Kuisisioner Monitoring Penerapan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Nama

8 responses

Safitri restu W

Eki Baehaki

M Rizki R

Fahmi Harfa

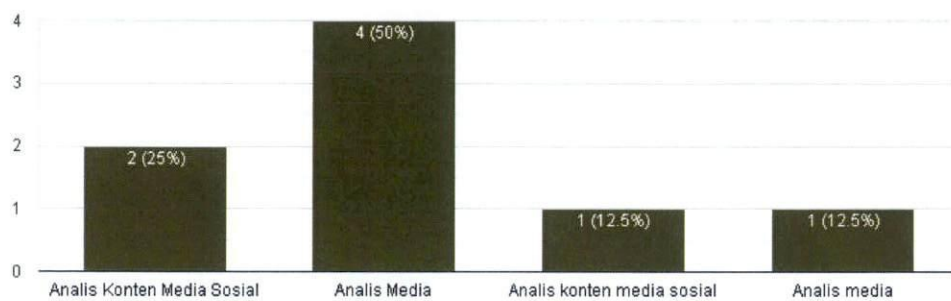
Rosnita

Mohammad Rizki Nugroho

Natasya

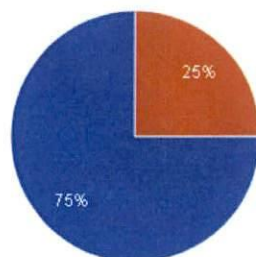
Muhammad Rizki Ramadhan

8 responses



Seberapa perlukah keberadaan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual?

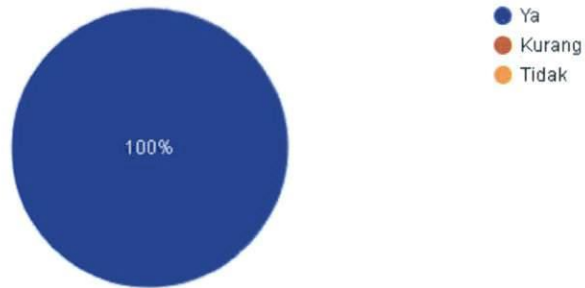
8 responses



- Sangat Perlu
- Perlu
- Kurang Perlu
- Tidak Perlu
- Sangat Tidak Perlu

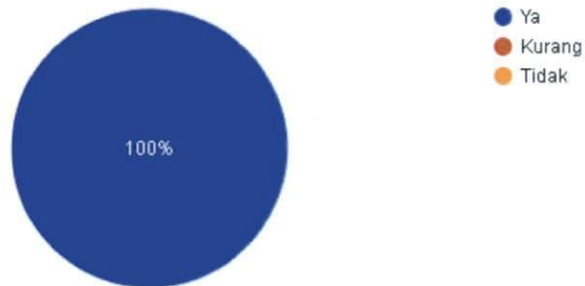
Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual mudah dimengerti?

8 responses



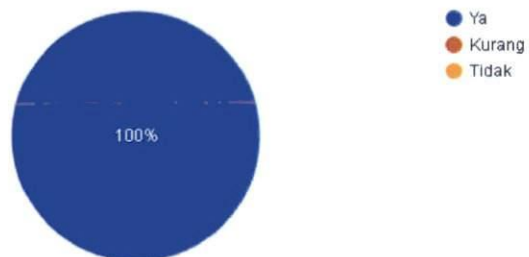
Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual bermanfaat bagi Saudara?

8 responses



Apakah Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual mempermudah Saudara dalam memahami strategi penyusunan rekomendasi isu aktual?

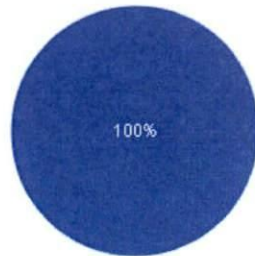
8 responses



Apakah anda memahami langkah-langkah penyusunan rekomendasi dalam Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual?



8 responses

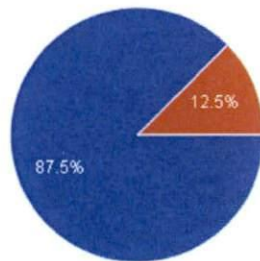


● Ya
● Kurang
● Tidak

Apakah menurut Saudara, Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dapat meningkatkan efisiensi kinerja Subbagian Analisis Media?



8 responses



● Ya
● Mungkin
● Tidak

Apakah ada kesulitan atau hambatan selama mengikuti Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual? (Jika ada, tuliskan kesulitan atau hambatan Saudara)

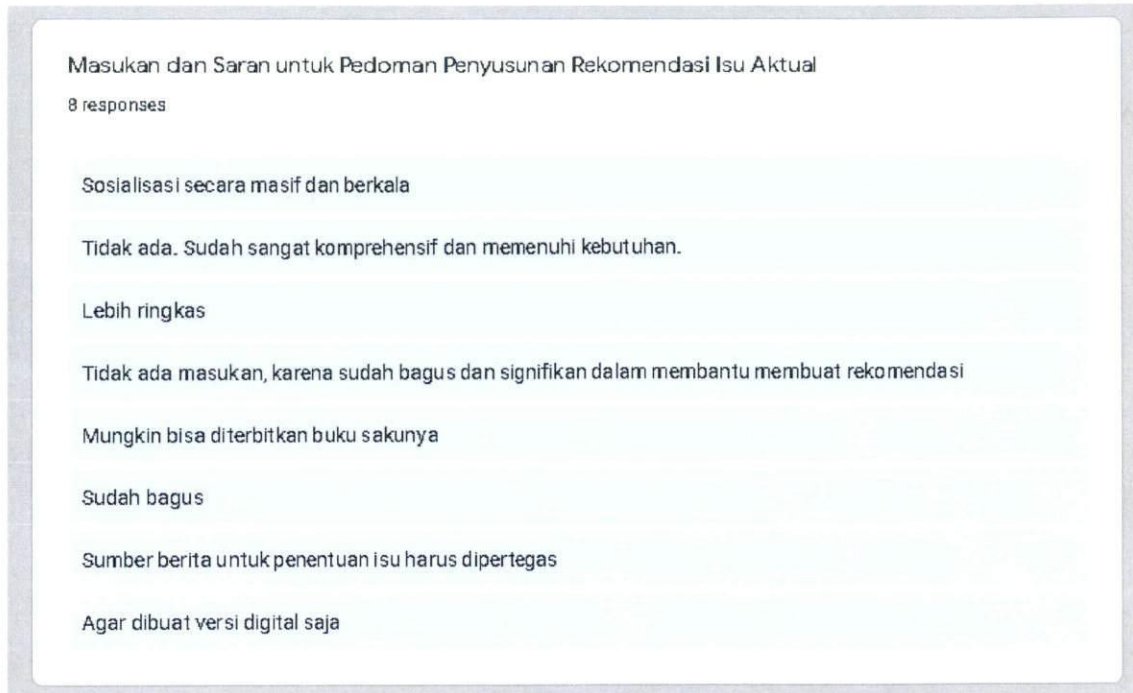
5 responses

Tidak ada

Tidak. Kesulitan hanya ditemukan ketika memang di media itu sendiri tidak memberitakan sesuatu yang penting untuk khalayak. Sehingga tidak begitu pas jika dibuatkan rekom.

Poinnya banyak jadi susah dihafal

Kesulitan mencari isu yg tepat diluar hot topic



Gambar V.9 Hasil Kuisisioner

Berdasarkan hasil kuisisioner tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual sesuai dengan kebutuhan analisis media untuk meningkatkan efisiensi kinerja analisis media, khususnya dalam penyusunan rekomendasi isu aktual. Hampir seluruhnya menyebutkan bahwa Pedoman bermanfaat dan mudah dipahami, namun terdapat beberapa catatan seperti masukan dan saran untuk ke depannya agar sosialisasi dilakukan secara masif dan berkala, lebih ringkas, penerbitan buku saku dan buku digital, serta sumber berita untuk penentuan isu harus dipertegas.

- c. *Melakukan wawancara testimoni terhadap beberapa pihak/stakeholders terkait, baik dari sisi output maupun outcome;*⁷ Selain melakukan kuisisioner sebagai responsif rekan-rekan analisis media terhadap output aktualisasi penulis, yaitu pedoman, penulis juga melakukan wawancara untuk melakukan monitoring *outcome* yang dihasilkan dari *output* tersebut. Penulis melakukan wawancara testimoni kepada sejumlah narasumber berikut:

⁷ Terlampir dalam bentuk video

1. Anggota Komisi IX DPR, Bapak Darul Siska. Dalam hal ini, Anggota DPR sebagai salah satu penerima manfaat dari Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual yang dibuat oleh penulis. Secara garis besar, pak Darul menyampaikan bahwa isu-isu yang disampaikan dalam rekomendasi isu aktual bermanfaat dan sangat membantu sebagai acuan anggota dewan apabila sedang *didoorstop* oleh media. Pak Darul memberikan masukan agar pengkategorian isu dalam rekomendasi isu aktual dapat diklasifikasikan sesuai isu-isu di komisi, sehingga Anggota Dewan yang menerima hasil rekomendasi isu aktual dapat lebih mudah dalam mengetahui update isu terbaru yang berkembang di komisi masing-masing.
2. Analis Konten Media Sosial, Natasya Arnanda, selaku pelaksana harian Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual. Tasya memaparkan bahwa keberadaan Pedoman ini meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja analis media, khususnya dalam membuat rekomendasi isu aktual di tengah keterbatasan waktu. Adanya pedoman ini dapat membantu analis media untuk mempercepat pemilihan isu. Tasya memberikan saran agar ke depannya sosialisasi pedoman dilakukan secara masif dan jika memungkinkan dapat dibuat dalam bentuk video animasi sehingga lebih menarik untuk ditayangkan.
3. Reporter Media Cetak, Virgianne Meiske Patuli, selaku reporter yang menggunakan hasil rekomendasi isu aktual sebagai patokan dalam melakukan *doorstop* kepada anggota. Virgianne menyampaikan bahwa isu-isu yang disampaikan dalam rekomendasi isu aktual sudah tepat, yaitu aktual dan sesuai dengan pemberitaan yang sedang marak atau berkembang di media-media. Rekomendasi Isu Aktual yang dibuat oleh analis media membantu

reporter untuk mengetahui informasi pemberitaan yang sedang *update*.

d. *Membuat laporan akhir aktualisasi.*

Terakhir, penulis membuat laporan akhir aktualisasi dari aktualisasi yang berjudul *Efisiensi Kinerja Analis Media Melalui Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual*, agar seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan dapat dilaporkan secara transparan dan dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya, sehingga mengedepankan nilai akuntabilitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

C. Stakeholder

Stakeholder pada Rancangan Aktualisasi Pembuatan Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual dibagi menjadi dua, yaitu *stakeholder* Internal dan *stakeholder* eksternal. Berikut penjelasan mengenai kedua *stakeholder* tersebut:

Stakeholder internal yaitu terdiri dari:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
2. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
3. Kepala Subbagian Analisis Media
4. Kepala Subbagian Media Cetak dan Website
5. Kepala Subbagian Media Sosial
6. Staf Analis Media

Stakeholder eksternal yaitu terdiri dari:

1. Pimpinan dan Anggota DPR RI
2. Sekretaris Jenderal DPR RI
3. Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan identifikasi *stakeholder* tersebut, dapat dianalisis bagaimana aktor-aktor terkait berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi rancangan aktualisasi yang diajukan oleh penulis. Keberhasilan implementasi suatu kegiatan, menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Berikut penjelasan mengenai kedua variable tersebut:

Isi Kebijakan (*Content Of Policy*) Mencakup Hal-Hal Berikut:

a. Kepentingan yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan

Pembuatan pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual ke depannya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

b. Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan

Manfaat dari penyusunan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual yaitu memudahkan analisis media dalam menentukan isu dalam penyusunan rekomendasi dan penyusunan rekomendasi itu sendiri, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan acuan bagi Anggota DPR dan Pimpinan DPR dalam memberikan pernyataan kepada media ataupun menanggapi isu-isu aktual yang sedang berkembang di media massa saat ini. Dengan menyampaikan rekomendasi yang tepat, maka dewan dapat meningkatkan citra positif DPR di kalangan masyarakat.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Dengan adanya pedoman pemilihan isu untuk rekomendasi isu aktual, seluruh Analisis Media diharapkan melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pedoman.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan saat ini berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), oleh karena itu rancangan aktualisasi membutuhkan verifikasi, koreksi, dan dukungan dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Kepala Subbagian Analisis

Media, Kepala Subbagian Media Cetak dan Website, Kepala Subbagian Media Sosial, dan seluruh rekan kerja analisis media.

e. (Siapa) Pelaksana Program

Pelaksana program atau rancangan aktualisasi adalah seluruh Tim Analisis Media DPR RI.

f. Sumber Daya yang Dihasilkan

Sumber daya yang dihasilkan berupa rekomendasi isu aktual.

Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*) Mencakup Hal-Hal Berikut:

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan dalam rancangan aktualisasi pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual, serta penunjukan pihak-pihak yang ditugasi untuk mengimplementasikan pedoman, dapat mempengaruhi perwujudan dari optimalisasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, untuk mewujudkan citra positif DPR, maka penyusunan rekomendasi oleh analis media untuk Pimpinan DPR dan Anggota DPR yang telah diverifikasi oleh atasan internal, menjadi hal yang penting, mengingat dalam hal ini aktor utama yang menggunakan rekomendasi secara langsung, yakni anggota dewan, memiliki kuasa atau pengaruh yang cukup besar sebagai anggota legislatif negara.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Rancangan Aktualisasi Pembuatan Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilihan isu dalam rekomendasi isu aktual yang ditujukan bagi Pimpinan DPR dan Anggota DPR sebagai anggota legislatif negara.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Setiap analis media, sebagai pelaksana rancangan aktualisasi, harus dapat mematuhi, memahami, dan menerapkan Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual secara optimal.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam mengimplementasikan rancangan aktualisasi, penulis menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya waktu melakukan aktualisasi di kantor dan adanya jadwal kegiatan pelatihan yang harus diikuti oleh penulis.

Namun, hal tersebut dapat segera diatasi oleh penulis. Seperti kendala dari terbatasnya waktu melakukan aktualisasi di kantor, dari mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Penulis memanfaatkan diskusi melalui chat whatsapp dan mempersiapkan waktu yang tepat untuk menyampaikan rencana aktualisasi penulis ini kepada atasan maupun rekan-rekan kerja. Namun, terbatasnya waktu ini menyebabkan belum seluruh analis media dapat benar-benar menggunakan pedoman, karena terdapat pembagian jadwal antara tim analis media yang membuat rekomendasi dan tim analis media yang membuat analisis media cetak dan analisis media online. Ke depannya, karena pedoman ini akan tetap berlanjut dan digunakan untuk seterusnya, pedoman akan tetap disosialisasikan sehingga dapat digunakan oleh seluruh analis media.

Kendala kedua yaitu adanya kegiatan pelatihan dadakan yang harus diikuti oleh penulis. Hal ini diatasi oleh penulis dengan mempercepat waktu pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan, sehingga seluruh tahapan kegiatan tetap dapat terlaksana dan selesai tepat waktu.

Sejauh ini, hanya dua hal tersebut yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan aktualisasi ini, mengingat jangka waktu yang diberikan cukup terbatas. Ke depannya implementasi Pedoman Penyusunan

Rekomendasi Isu Aktual ini akan terus digunakan dan tidak menutup kemungkinan untuk diberikan revisi-revisi atau masukan lebih lanjut.

E. Analisis Dampak

Dampak dari pelaksanaan aktualisasi, yaitu pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah kinerja analis media dalam menentukan dan menetapkan isu-isu berita yang akan diangkat dalam penulisan rekomendasi isu aktual. Selain itu, dengan memahami dan menerapkan pedoman tersebut, maka diharapkan analis media mampu membuat rekomendasi isu aktual yang lebih terarah dan jelas, serta meminimalisir adanya rekomendasi isu aktual yang *didrop* atau diminta untuk dihapus oleh atasan. Pedoman tersebut juga akan berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi isu aktual yang dibuat dan *stakeholders* terkait dari setiap poin-poin rekomendasi isu aktual, mengingat rekomendasi diharapkan dapat membantu Pimpinan dan Anggota Dewan ketika *didoorstop* oleh wartawan dan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan citra DPR. Selain itu, dengan diterapkannya pedoman ini, nilai komitmen mutu Subbagian Analisis Media juga dapat ditingkatkan.

Namun, apabila Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual tersebut tidak dilaksanakan, akan berdampak pada masih terjadinya subjektifitas atau perbedaan persepsi mengenai pemilihan isu dalam rekomendasi isu aktual dan juga penyusunan rekomendasi isu aktualnya itu sendiri. Selain itu, dalam melakukan klasifikasi isu, juga akan memakan waktu lebih lama dikarenakan memerlukan kesepakatan secara informal terlebih dahulu, baik ke sesama rekan kerja maupun atasan. Terakhir, setelah dikoreksi oleh atasan, dari sejumlah isu yang telah dipilih dan dibuat, masih adanyapotensi sejumlah isu ataupun hasil analisis media yang *didrop* atau tidak jadi dibuat rekomendasinya. Hal tersebut dapat berdampak tidak efisiennya kinerja analis media di tengah keterbatasan waktu penyusunanrekomendasi isu aktual setiap harinya.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual telah berhasil disusun guna meningkatkan efisiensi kinerja analis media dalam menyusun rekomendasi isu aktual setiap harinya. Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual ini juga sesuai dengan kebutuhan beban kerja Subbagian Analisis Media. Selain itu, pedoman tersebut sangat mendukung terlaksananya kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual, diharapkan analis media dapat memiliki pemahaman yang seragam terhadap pengertian rekomendasi, pengertian isu aktual, manfaat dan tujuan rekomendasi, teknik dan strategi penentuan isu, teknik dan strategi penyusunan rekomendasi isu aktual, serta langkah-langkah penyusunan rekomendasi isu aktual. Dengan pemahaman yang seragam tersebut, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih tepat, mengingat rekomendasi ditujukan untuk membantu Pimpinan dan Anggota Dewan ketika didoorstop oleh wartawan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan citra DPR.

Walaupun di tengah keterbatasan waktu pelaksanaan aktualisasi, pedoman analis media dapat diimplementasikan secara maksimal. Penulis juga menerapkan nilai-nilai ANEKA, seperti Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, serta menerapkan mata pelatihan seperti manajemen ASN, *Whole of Government* (WoG), dan Pelayanan Publik, dalam menerapkan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual yang dilakukan selama masa habituasi.

Oleh karena itu, diharapkan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual ini dapat mendukung kinerja Subbagian Analisis Media sehingga seluruh pegawai di Subbagian Analisis Media dapat memiliki kapabilitas dan integritas yang baik, dan dapat menjalankan tugas dan fungsi ASN secara optimal

B. SARAN

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) DPR RI telah memberikan upaya terbaik dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Setjen DPR RI. Akan tetapi, situasi pandemi Covid-19 yang saat ini menjadi tantangan, membuat diklat pra jabatan CPNS dilakukan secara *daring* atau *online*, dan merupakan diklat pra jabatan CPNS pertama kali yang dilakukan secara *full online*.

Akan tetapi terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan pelatihan dasar (Latsar) CPNS secara online ini, seperti miss-komunikasi antara panitia dan peserta karena sebagian besar informasi disampaikan melalui chat, informasi yang diberikan terkadang terlalu mendadak dan kurang terintegrasi sehingga membuat peserta Latsar minim persiapan, serta sistem yang digunakan terkadang mengalami rusak sistem karena angkatan kami merupakan angkatan pertama yang menggunakan sistem Latsar full online.

Namun hal tersebut dapat diterima, mengingat Pusdiklat yang baru pertama kali mengadakan kegiatan diklat pra jabatan secara *full online*, sehingga masih perlu adaptasi dan evaluasi lebih lanjut agar penyelenggaraan Latsar ke depannya dapat lebih baik dan tetap menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Penulis mengucapkan terima kasih dan berharap Pusdiklat Setjen DPR RI memberikan yang terbaik dan mendukung semua kebutuhan CPNS Setjen DPR RI, dengan melakukan perbaikan dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Diklat.

2. Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

Unit kerja telah mendukung dan memberikan yang terbaik untuk membantu CPNS Setjen DPR RI dalam menyelesaikan diklat dalam masa habituasi. Seperti memberikan masukan, saran, memfasilitasi sarana, dan prasarana bagi CPNS dalam menyelesaikan Latsar CPNS Setjen DPR di lingkungan kantor.

Selain itu, unit kerja juga tidak terlalu memforsir CPNS dalam bekerja, dan memberikan waktu untuk CPNS juga menyelesaikan tugas-tugas Latsar di tengah situasi bekerja setiap harinya. Namun, unit kerja tetap mengharuskan CPNS menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya dan juga tugas-tugas lain yang diberikan, sehingga CPNS sebagai peserta Latsar harus dapat membagi waktu untuk dapat mengerjakan tugas Latsar tersebut.

Namun peserta Latsar mampu menyelesaikan seluruh kegiatan dengan baik. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat dalam agenda habituasi merupakan waktu bagi CPNS untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan tetap harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di unit kerja melalui isu utama yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi.

Daftar Pustaka

AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Idris, Irfan dkk. 2019. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Analisis Isu Kontemporer. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Sumber Internet:

<https://www.dpr.go.id/jdih/peraturan-sekjen>

<https://romeltea.com/10-nilai-berita-news-values/>

Sumber Lainnya:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1

RESUME
PENYAMPAIAN USULAN PEMBUATAN PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI ISU AKTUAL

Hari/tanggal : Jumat, 7 Mei 2021
Pukul : 15:00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Bagian Medtaksos, Nusantara II DPR RI
Kegiatan : Penyampaian Usulan Pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual
Pimpinan Rapat : Mohammad Djazuli (Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial)
Rapat dihadiri oleh : 1. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI;
2. Kasubag Sub Bagian Analisis Media;
3. Para Staf Sub Bagian Analisis Media.
Notulis : Larissa Amanda Indianti.

- I. Rapat dibuka jam 15.00 WIB oleh Mohammad Djazuli.
- II. Hasil diskusi bersama Kepala Bagian Medtaksos, Kasubag Analisis Media, dan para Staf Analisis Media, yaitu sebagai berikut:
 - Pembuatan pedoman disetujui untuk dilakukan;
 - Ada kemungkinan jangka panjang, pedoman dapat dikembangkan menjadi *Standard Operating Procedure* (SOP);
 - Pedoman dinilai sangat penting dan bermanfaat sebagai acuan analisis media agar dapat menentukan isu secara tepat;
 - Dalam pedoman pemilihan isu analisis media, dapat ditambahkan strategi dan teknis penulisan rekomendasi isu aktual itu sendiri;
 - Pedoman pemilihan isu diharapkan dapat dipahami secara jelas oleh rekan-rekan analisis media lainnya;
 - Usulan dari Kasubag agar pedoman mencakup keseluruhan mengenai penyusunan rekomendasi isu aktual, sehingga pedoman dengan judul awal "Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual" berganti menjadi berjudul "Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual."
- III. Diskusi Ditutup Pukul 16.00 WIB

Jakarta, 7 Mei 2021
Kepala Bagian
Media Cetak dan Media Sosial


Drs. Mohammad Djazuli, M.Si,
NIP: 19651031 199403 1 002



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Rancangan Aktualisasi Dengan Judul "Efisiensi Kinerja Analis Media Melalui Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual"

HARI/TANGGAL: Jum'at, 7 Mei 2021

No.	NAMA	BAGIAN/UNIT	TANDA TANGAN
1	Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.	Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial	
2	Suciati, S.Sos.	Kasubag Analis Media	
3	Larissa Amanda	Analis Media	
4	M. Rizki Renadhani	"	
5	Evi Bachari	"	
6	Fitranto	Analisis media	
7	Ajuning H	Jurnalis	
8	Rodhan	"	
9	Eduni Hanifa	Analisis	
10	Natasya A.P.	Analisis Media	
11			
12			
13			
14			
15			

Lampiran 2

Draft Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

A. Pendahuluan

Subbagian Analisis Media melaksanakan sejumlah kegiatan, yaitu melakukan kliping berita, analisis media cetak, analisis media online, ikhtisar berita, agenda setting, dan pembuatan rekomendasi isu aktual. Sejumlah kegiatan tersebut, bertujuan untuk menunjang kinerja dewan dalam membuat citra lembaga agar menjadi lebih positif. Untuk itu, agar kegiatan dapat dilakukan secara optimal dan efisien, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya, dalam hal ini, Penulis akan membuat pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual.

Pembuatan pedoman tersebut, berdasarkan latar belakang masalah masih belum samanya persepsi tiap analis media dalam menentukan isu yang akan diangkat dalam suatu rekomendasi. Hal tersebut terkadang menyebabkan adanya rekomendasi yang *didrop* sehingga menyebabkan pembuatan rekomendasi isu aktual menjadi kurang efisien.

Oleh karena itu, pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual ini diharapkan dapat mempermudah kinerja analis media dalam menentukan isu yang akan diangkat untuk membuat suatu rekomendasi, dikarenakan setiap analis media memiliki *basic* atau dasar yang sama dalam menentukan isu. Melalui pedoman ini, analis media juga diharapkan dapat memahami strategi untuk penulisan rekomendasi.

B. Pengertian Rekomendasi Analisis Media

Rekomendasi Analisis Media merupakan saran berdasarkan hasil analisis isu berita, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang, dalam hal ini seluruh Pimpinan dan Anggota DPR, sebagai acuan untuk memberikan pernyataan atau respon kepada Pemerintah agar melakukan tindakan dan/atau perbaikan terhadap isu-isu yang diangkat, dengan mengacu kepada tiga fungsi utama dewan, yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran.

C. Pengertian Isu Aktual

Isu aktual merupakan isu yang mengangkat peristiwa yang benar-benar sedang terjadi saat ini, dan tidak menutup kemungkinan akan masih dapat berkembang hingga beberapa waktu ke depan. Isu aktual juga berarti isu tersebut sedang hangat dibicarakan dikalangan masyarakat, atau isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

D. Manfaat dan Tujuan Rekomendasi Isu Aktual

Manfaat:

Rekomendasi isu aktual diharapkan dapat membantu Pimpinan dan Anggota Dewan ketika *didoorstop* oleh wartawan dan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan citra DPR melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan dewan kepada media melalui rekomendasi yang dibuat.

Tujuan:

Rekomendasi isu aktual bertujuan untuk memberikan acuan kepada seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR RI guna memudahkan untuk mendapat informasi terkait pemberitaan maupun isu-isu aktual yang sedang berkembang.

E. Teknik dan Strategi Penentuan Isu

Dalam menentukan isu yang akan diangkat dalam rekomendasi isu aktual, harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja dewan. Berikut pedoman pemilihan isu untuk Rekomendasi Isu Aktual:

1. Pemilihan isu dapat melihat isu-isu strategis

Isu strategi merupakan isu dengan gambaran kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritas dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Biasanya mencakup isu-isu terkait di setiap Komisi DPR, seperti keuangan/ekonomi, pendidikan, pangan, dan sebagainya.

2. Isu harus masih relevan dengan kondisi ketika rekomendasi akan dibuat

Isu yang dipilih harus dengan kisaran waktu pemberitaan paling *update* atau terbaru, dan merupakan isu yang akan dan sedang berlangsung, maksimal satu hari yang lalu, atau bisa dalam jangka waktu beberapa hari lalu namun terdapat perkembangan isu

yang perlu diangkat saat ini atau isu tersebut belum mendapatkan respon atau tindak lanjut dari Pemerintah atau *stakeholder* terkait.

3. Isu memiliki pengaruh terhadap publik

Isu yang dipilih harus memiliki pengaruh yang cukup besar bagi publik atau masyarakat luas.

4. Isu terkait dengan kepentingan banyak kelompok masyarakat

Isu yang diangkat harus dapat diketahui seberapa penting isu tersebut untuk diketahui oleh masyarakat dalam bentuk respon atau tanggapan dewan.

5. Isu berdampak pada masyarakat luas

Isu yang dipilih merupakan isu yang berdampak luas, khususnya isu yang berdampak negatif atau kurang baik yang ditimbulkan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu atau perorangan.

6. Isu merupakan isu momentum

Isu yang dipilih merupakan isu peringatan atau momen-momen kegiatan tertentu, seperti aksi demo, peringatan hari-hari besar ataupun keagamaan, ataupun konferensi antar negara yang memiliki dampak bagi Indonesia.

7. Isu berskala nasional

Isu yang dipilih harus merupakan isu-isu berskala nasional, bukan merupakan isu regional atau isu yang hanya bersifat aktual di satu kawasan tertentu.

8. Isu terkait bencana

Isu terkait bencana juga dapat dipilih apabila bencana yang dimaksud berupa (1) bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan banyak korban jiwa ataupun kerusakan lingkungan atau pembangunan, serta ke depannya berpotensi masih terus berkembang; dan (2) bencana seperti kecelakaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa maupun luka, serta mengganggu kelancaran perjalanan, diprioritaskan untuk kecelakaan pesawat, kapal laut, dan kereta api.

9. Isu berketerkaitan dengan fungsi DPR di bidang pengawasan, legislasi, anggaran, maupun diplomasi

Pemilihan isu hendaknya memperhatikan dan mengkaitkan dengan tugas dan fungsi DPR dalam bidang pengawasan, legislasi, anggaran, maupun diplomasi.

10. Isu memiliki kedekatan peristiwa terhadap khalayak secara geografis, psikologis, dan ideologis

Isu yang diangkat juga harus memperhatikan kondisi geografis (lokasi peristiwa), psikologis (keterikatan budaya), dan ideologis (isu terkait keagamaan, tetapi bukan merupakan keberpihakan atau ikut campur mengenai satu agama tertentu, namun lebih kepada isu terkait keagamaan yang dapat berpotensi memecah belah bangsa).

11. Isu yang dipilih memiliki nilai berita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dewan

Selain itu, isu yang dipilih agar dapat diarahkan untuk membangun dan meningkatkan citra positif Dewan di hadapan masyarakat.

12. Isu yang dipilih untuk mengcounter atau mengimbangi pemberitaan negatif tentang Dewan.

Isu yang dipilih harus dapat menunjukkan sisi positif Dewan dalam melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, guna menunjukkan kepada masyarakat sisi positif dari DPR RI.

13. Isu tidak bersifat politis

Isu yang dipilih tidak berdasarkan kepentingan satu pihak tertentu saja, tidak terkait partai politik, personal politisi atau pejabat, mengingat DPR RI merupakan representatif masyarakat yang menaungi banyak kepentingan dari berbagai Partai Politik.

14. Isu bertentangan dengan regulasi

Isu dapat diangkat apabila isu tersebut berindikasi atau memang bertentangan dengan regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

15. Isu untuk mengawasi kinerja Pemerintah

Isu yang diangkat diharapkan untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kinerja Pemerintah, bukan bersifat menyudutkan atau menyalahkan Pemerintah.

16. Bersifat mendukung kinerja DPR RI

Analisis Media harus selalu *update* dengan kinerja DPR RI, khususnya dari *goals* terhadap RUU tertentu, sehingga isu terkait RUU juga dapat diangkat dengan tujuan untuk mendukung DPR RI dalam mensosialisasikan suatu RUU.

17. Isu mengenai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah

Isu yang dipilih dapat berupa isu mengenai kebijakan atau regulasi yang ditetapkan Pemerintah dan berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

18. Isu terkait tokoh

Isu terkait tokoh dapat diangkat apabila tokoh tersebut meninggal dunia, atau tokoh tersebut mengucapkan pernyataan dan melakukan sesuatu yang berdampak luas kepada masyarakat.

19. Isu konflik-konflik tertentu

Isu mengenai konflik-konflik tertentu yang mengancam pertahanan negara atau mengancam kehidupan bernegara masyarakat, dapat diangkat, seperti perang, peristiwa ketegangan, keributan, ataupun keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

20. Isu memiliki nilai *human interest*

Isu yang diangkat dapat berupa peristiwa yang terkait dengan kemanusiaan, seperti perbudakan dan penganiayaan, perjuangan bangsa yang masih dijajah, atau peristiwa yang dapat menimbulkan efek emosi dan simpati.

21. Isu viral atau trending

Isu viral atau trending dapat diangkat apabila isu tersebut valid dan mencakup sejumlah poin-poin ketentuan pemilihan isu lainnya, misalnya beberapa waktu lalu isu viralnya brosur pernikahan usia anak yang dikeluarkan oleh *wedding organizer*. Isu tersebut dapat diangkat karena memiliki pengaruh bagi masyarakat luas dan bertentangan dengan Undang-Undang.

F. Teknik dan Strategi Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Setelah melakukan pemilihan isu, Analisis Media kemudian melakukan pembuatan rekomendasi dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:

- a. Dalam satu rekomendasi, terdiri dari satu sampai dua kalimat prolog dan diikuti oleh poin-poin saran, masukan, kritik, harapan, ucapan, dan lain-lain;
- b. Dalam prolog rekomendasi, menjelaskan permasalahan atas isu yang diangkat secara jelas;
- c. Dalam poin-poin rekomendasi harus memperhatikan tiga fungsi utama DPR, yaitu penerapan fungsi pengawasan, legislasi, maupun anggaran;
- d. Poin rekomendasi berupa kalimat yang bermuatan penilaian, dukungan, saran, masukan, kritik, harapan, ucapan, dan lain-lain yang ditujukan kepada Pemerintah, lembaga, mitra kerja dewan, masyarakat, atau DPR RI sendiri;
- e. Substansi dari poin-poin rekomendasi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi paling *update* terkait isu;
- f. Poin rekomendasi juga bisa berupa penjelasan atau pun pemberitahuan mengenai progres kinerja DPR RI, seperti penjelasan mengenai status RUU, dan lain-lain sebagainya;
- g. Dalam satu rekomendasi, dapat disertakan data pendukung yang berasal dari institusi pemerintahan ataupun lembaga yang terpercaya dan terverifikasi;
- h. Dapat mencantumkan regulasi atau peraturan terkait apabila diperlukan, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang dikeluarkan Pemerintah;
- i. Mengikuti seluruh penggunaan dan ejaan kata baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- j. Mengikuti masukan dan arahan dari atasan terkait pembuatan rekomendasi.

Lampiran 3

RESUME

PENYAMPAIAN USULAN PEMBUATAN PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI ISU AKTUAL

Hari/tanggal : Senin, 17 Mei 2021
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Medtaksos, Nusantara II DPR RI
Kegiatan : Penyampaian Usulan Pembuatan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual
Pimpinan Kegiatan : Suciati, S.Sos
Kegiatan dihadiri oleh : 1. Kasubbag Analisis Media;
2. Para Staf Sub Bagian Analisis Media.
Notulis : Larissa Amanda Indianti.

I. Rapat dibuka jam 10.00 WIB oleh Suciati.

II. Hasil diskusi bersama Atasan dan rekan-rekan kerja Analisis Media, yaitu sebagai berikut:

- Masukan dari Kasubbag Analisis Media untuk merevisi judul beberapa bagian, yaitu menjadi Teknik dan Strategi Penentuan Isu dan Teknik dan Strategi Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual;
- Kasubbag mengarahkan agar substansi penentuan isu memasukkan keterkaitan dengan nilai berita;
- Perlu penambahan beberapa bagian seperti pendahuluan, pengertian rekomendasi, dan pengertian isu aktual;
- Pembuatan pedoman diharapkan dapat berdampak pada pembuatan rekomendasi yang benar-benar merupakan isu aktual dan tidak ketinggalan;
- Dengan adanya pedoman, diharapkan pembuatan rekomendasi isu aktual dapat tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan;
- Pedoman diharapkan dapat diimplementasikan oleh semua analis media;
- Pembuatan pedoman harus dapat mempermudah kinerja analis media, khususnya dalam menentukan isu;
- Dalam pedoman pemilihan isu, analis media diharapkan dapat lebih mudah mengkategorisasikan isu-isu yang akhirnya dapat ditentukan menjadi isu untuk rekomendasi isu aktual.

III. Rapat Ditutup Pukul 11.30 WIB

Jakarta, 17 Mei 2021
Kepala Bagian
Media Cetak dan Media Sosial



Suciati, S.Sos
NIP: 197207201994032002



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Rancangan Aktualisasi Dengan Judul "Efisiensi Kinerja Analisis Media Melalui Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual"

HARI/TANGGAL: Senin, 17 Mei 2021

No.	NAMA	BAGIAN/UNIT	TANDA TANGAN
1	Suciati, S.Sos.	Kasubag Analisis Media	
2	Larissa Amanda Indiant	Analisis Media	
3	M. Rizki Ramadha	"	
4	Eko Bachari	"	
5	Fibranto	Analisis media	
6	Agung H.	Jurnalis	
7	Ridwan	"	
8	Fahmi Harfa	Analisis	
9	Natasya A.P.	Analisis Media	
10			
11			
12			
13			
14			
15			



Daftar Isi

Pendahuluan.....	3
Pengertian Rekomendasi Analisis Media.....	4
Pengertian Isu Aktual.....	4
Manfaat dan Tujuan Rekomendasi Isu Aktual.....	5
Teknik dan Strategi Penentuan Isu.....	6
Teknik dan Strategi Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual...14	
Langkah Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual.....	17
Penutup.....	19

Pendahuluan

Subbagian Analisis Media melaksanakan sejumlah kegiatan, yaitu melakukan kliping berita, analisis media cetak, analisis media online, ikhtisar berita, agenda setting, dan pembuatan rekomendasi isu aktual. Sejumlah kegiatan tersebut, bertujuan untuk menunjang kinerja dewan dalam membuat citra lembaga agar menjadi lebih positif. Untuk itu, agar kegiatan dapat dilakukan secara optimal dan efisien, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya, dalam hal ini, Penulis akan membuat pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual.

Pembuatan pedoman tersebut, berdasarkan latar belakang masalah masih belum samanya persepsi tiap analis media dalam menentukan isu yang akan diangkat dalam suatu rekomendasi. Hal tersebut terkadang menyebabkan adanya rekomendasi yang *didrop* sehingga menyebabkan pembuatan rekomendasi isu aktual menjadi kurang efisien.

Oleh karena itu, pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual ini diharapkan dapat mempermudah kinerja analis media dalam menentukan isu yang akan diangkat untuk membuat suatu rekomendasi, dikarenakan setiap analis media memiliki basic atau dasar yang sama dalam menentukan isu. Melalui pedoman ini, analis

dalam menentukan isu. Melalui pedoman ini, analisis media juga diharapkan dapat memahami strategi untuk penulisan rekomendasi.

Pengertian Rekomendasi Analisis Media

Rekomendasi Analisis Media merupakan saran berdasarkan hasil analisis isu berita, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang, dalam hal ini seluruh Pimpinan dan Anggota DPR, sebagai acuan untuk memberikan pernyataan atau respon kepada Pemerintah agar melakukan tindakan dan/atau perbaikan terhadap isu-isu yang diangkat, dengan mengacu kepada tiga fungsi utama dewan, yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Pengertian Isu Aktual

Isu aktual merupakan isu yang mengangkat peristiwa yang benar-benar sedang terjadi saat ini, dan tidak menutup kemungkinan akan masih dapat berkembang hingga beberapa waktu ke depan. Isu aktual juga berarti isu tersebut sedang hangat dibicarakan dikalangan masyarakat, atau isu yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

Manfaat dan Tujuan Rekomendasi Isu Aktual

Manfaat:

Rekomendasi isu aktual diharapkan dapat membantu Pimpinan dan Anggota Dewan ketika didoorstop oleh wartawan dan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan citra DPR melalui pernyataan-pernyataan yang disampaikan dewan kepada media melalui rekomendasi yang dibuat.

Tujuan:

Rekomendasi isu aktual bertujuan untuk memberikan acuan kepada seluruh Pimpinan DPR, Anggota DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR RI guna memudahkan untuk mendapat informasi terkait pemberitaan maupun isu-isu aktual yang sedang berkembang.

Teknik dan Strategi Penentuan Isu

Dalam menentukan isu yang akan diangkat dalam rekomendasi isu aktual, harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja dewan. Berikut pedoman pemilihan isu untuk Rekomendasi Isu Aktual:

1. Pemilihan isu dapat melihat isu-isu strategis

Isu strategis merupakan isu dengan gambaran kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritas dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Biasanya mencakup isu-isu terkait di setiap Komisi DPR, seperti keuangan/ekonomi, pendidikan, pangan, dan sebagainya.

2. Isu harus masih relevan dengan kondisi ketika rekomendasi akan dibuat

Isu yang dipilih harus dengan kisaran waktu pemberitaan paling update atau terbaru, dan merupakan isu yang akan dan sedang berlangsung, maksimal satu hari yang lalu, atau bisa dalam jangka waktu beberapa hari lalu namun terdapat perkembangan isu yang perlu diangkat saat ini atau isu tersebut belum mendapatkan

respon atau tindak lanjut dari Pemerintah atau stakeholder terkait.

3. Isu memiliki pengaruh atau dampak terhadap publik

Isu yang dipilih harus memiliki pengaruh atau dampak yang cukup besar bagi publik atau masyarakat luas, khususnya terkait isu yang berdampak negatif atau kurang baik yang ditimbulkan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu atau perorangan.

4. Isu terkait dengan kepentingan banyak kelompok masyarakat

Isu yang diangkat harus terkait dengan kepentingan banyak kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok masyarakat tertentu saja. Selain itu, harus dapat diketahui seberapa penting isu tersebut untuk diketahui oleh masyarakat dalam bentuk respon atau tanggapan dewan.

5. Isu memiliki kedekatan dengan masyarakat (Proximity)

Isu hendaknya memiliki kedekatan peristiwa terhadap khalayak secara geografis, psikologis, dan ideologis. Kondisi geografis yaitu isu harus memperhatikan lokasi peristiwa. Kondisi psikologis yaitu isu juga harus memperhatikan keterikatan budaya ataupun pola pikir dengan masyarakat. Terakhir yaitu secara ideologis, seperti isu terkait keagamaan, tetapi bukan merupakan keberpihakan atau ikut campur mengenai satu agama tertentu, namun lebih kepada isu terkait keagamaan yang dapat berpotensi memecah belah bangsa.

6. Isu merupakan isu momentum

Isu yang dipilih merupakan isu peringatan atau momen-momen kegiatan tertentu, seperti aksi demo, peringatan hari-hari besar ataupun keagamaan, ataupun konferensi antar negara yang memiliki dampak bagi Indonesia.

7. Isu berskala nasional

Isu yang dipilih harus merupakan isu-isu berskala nasional, bukan merupakan isu regional atau isu yang hanya bersifat aktual di satu kawasan tertentu.

8. Isu terkait bencana

Isu terkait bencana juga dapat dipilih apabila bencana yang dimaksud berupa (1) bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan banyak korban jiwa ataupun kerusakan lingkungan atau pembangunan, serta ke depannya berpotensi masih terus berkembang; dan (2) bencana seperti kecelakaan yang mengakibatkan banyak korban jiwa maupun luka, serta mengganggu kelancaran perjalanan, diprioritaskan untuk kecelakaan pesawat, kapal laut, dan kereta api.

9. Isu berketerkaitan dengan fungsi DPR di bidang pengawasan, legislasi, anggaran, maupun diplomasi

Pemilihan isu hendaknya memperhatikan dan mengkaitkan dengan tugas dan fungsi DPR dalam bidang pengawasan, legislasi, anggaran, maupun diplomasi.

10. Isu yang dipilih memiliki nilai berita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dewan

Selain itu, isu yang dipilih agar dapat diarahkan untuk membangun dan meningkatkan citra positif Dewan di hadapan masyarakat, dalam menjalankan peran dan fungsi-fungsi dewan di bidang pengawasan, legislasi, maupun anggaran.

11. Isu yang dipilih untuk mengcounter atau mengimbangi pemberitaan negatif tentang Dewan.

Isu yang dipilih harus dapat menunjukkan sisi positif Dewan dalam melakukan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, guna menunjukkan kepada masyarakat sisi positif dari DPR RI.

12. Isu berketerkaitan dengan regulasi

Isu dapat diangkat apabila isu tersebut memiliki keterkaitan dengan suatu regulasi yang berlaku, khususnya apabila suatu isu berindikasi atau bertentangan dengan regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

13. Isu untuk mengawasi kinerja Pemerintah

Isu yang diangkat diharapkan untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kinerja Pemerintah, bukan bersifat menyudutkan atau menyalahkan Pemerintah.

14. Bersifat mendukung kinerja DPR RI

Analisis Media harus selalu update dengan kinerja DPR RI, khususnya dari goals terhadap RUU tertentu, sehingga isu terkait RUU juga dapat diangkat dengan tujuan untuk mendukung DPR RI dalam mensosialisasikan suatu RUU.

15. Isu mengenai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah

Isu yang dipilih dapat berupa isu mengenai kebijakan atau regulasi yang ditetapkan Pemerintah dan berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

16. Isu terkait tokoh

Isu terkait tokoh dapat diangkat apabila tokoh tersebut meninggal dunia, atau tokoh tersebut mengucapkan pernyataan dan melakukan sesuatu yang berdampak luas kepada masyarakat.

17. Isu konflik-konflik tertentu

Isu mengenai konflik-konflik tertentu yang mengancam pertahanan negara atau mengancam kehidupan bernegara masyarakat, dapat diangkat, seperti perang, peristiwa ketegangan, kericuhan, ataupun keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

18. Isu memiliki nilai human interest

Isu yang diangkat dapat berupa peristiwa yang terkait dengan kemanusiaan, seperti perbudakan dan penganiayaan, perjuangan bangsa yang masih dijajah, atau peristiwa yang dapat menimbulkan efek emosi dan simpati.

19. Isu viral atau trending

Isu viral atau trending dapat diangkat apabila isu tersebut valid dan mencakup sejumlah poin-poin ketentuan pemilihan isu lainnya, misalnya beberapa waktu lalu isu viralnya brosur pernikahan usia anak yang dikeluarkan oleh wedding organizer. Isu tersebut dapat diangkat karena memiliki pengaruh bagi masyarakat luas dan bertentangan dengan Undang-Undang.

20. Isu tidak bersifat politis

Isu yang dipilih tidak berdasarkan kepentingan satu pihak tertentu saja, tidak terkait partai politik, dan tidak untuk personal politisi atau pejabat, mengingat DPR RI merupakan representatif masyarakat yang menaungi banyak kepentingan dari berbagai Partai Politik.

Teknik dan Strategi Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Setelah melakukan pemilihan isu, Analisis Media kemudian melakukan pembuatan rekomendasi dengan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:

- a. Dalam satu rekomendasi, terdiri dari satu sampai dua kalimat prolog dan diikuti oleh poin-poin saran, masukan, kritik, harapan, ucapan, dan lain-lain;
- b. Dalam prolog rekomendasi, menjelaskan permasalahan atas isu yang diangkat secara jelas;
- c. Dalam poin-poin rekomendasi harus memperhatikan tiga fungsi utama DPR, yaitu penerapan fungsi pengawasan, legislasi, maupun anggaran;
- d. Poin rekomendasi berupa kalimat yang bermuatan penilaian, dukungan, saran, masukan, kritik, harapan, ucapan, dan lain-lain yang ditujukan kepada Pemerintah, lembaga, mitra kerja dewan, masyarakat, atau DPR RI sendiri;
- e. Substansi dari poin-poin rekomendasi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi paling update terkait isu;

- f. Substansi dari poin-poin rekomendasi dapat merekomendasikan kebijakan atau langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan oleh stakeholders yang telah ditentukan;
- g. Poin rekomendasi juga bisa berupa penjelasan atau pun pemberitahuan mengenai progres kinerja DPR RI, seperti penjelasan mengenai status RUU, dan lain-lain sebagainya;
- h. Dalam satu rekomendasi, dapat disertakan data pendukung yang berasal dari institusi pemerintahan ataupun lembaga yang terpercaya dan terverifikasi;
- i. Dapat mencantumkan regulasi atau peraturan terkait apabila diperlukan, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang dikeluarkan Pemerintah;
- j. Mengikuti seluruh penggunaan dan ejaan kata baku yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- k. Penulisan nama instansi atau lembaga dalam satu rekomendasi harus ditulis lengkap, yang kemudian diikuti dengan penulisan nama singkatan atau akronim di dalam kurung, sehingga apabila nama instansi atau lembaga tersebut disebutkan kembali dalam satu rekom yang sama, cukup

menyebutkan nama singkatan atau akronimnya saja;

I. Apabila menuliskan kata yang berakronim atau singkatan dalam satu rekomendasi, harus terlebih dahulu menuliskan kepanjangannya. Jika akan menuliskan kembali, akronim atau singkatan dalam satu rekom yang sama, maka cukup menuliskan akronim dan singkatannya saja;

I. Mengikuti masukan dan arahan dari atasan terkait pembuatan rekomendasi.

Langkah Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual

Setelah memahami strategi penentuan isu dan penyusunan rekomendasi isu aktual, analis diharapkan mampu memahami sejumlah langkah berikut untuk mempermudah penyusunan rekomendasi:

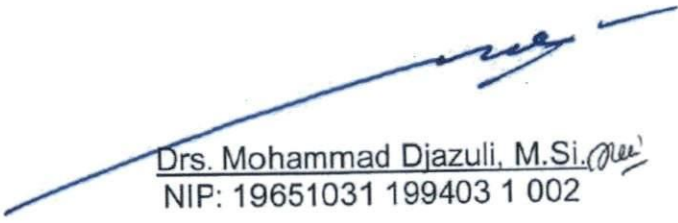
- a. Analis melakukan *issue scanning* terhadap pemberitaan-pemberitaan di media cetak, online, sosial, maupun siaran;
- b. Analis memilih salah satu isu yang diprioritaskan sesuai dengan strategi penentuan isu untuk diangkat menjadi sebuah rekomendasi;
- c. Analis menentukan permasalahan pokok yang akan diangkat untuk menyusun kalimat prolog, sehingga prolog rekomendasi langsung mengacu kepada permasalahan yang akan diangkat;
- d. Analis dapat menambahkan data-data yang dibutuhkan dalam prolog beserta sumbernya, untuk mendukung dan memperkuat permasalahan yang diangkat;
- e. Setelah membuat prolog, analis menentukan poin-poin rekomendasi yang berurutan sesuai prioritas penyelesaian masalah;

f. Analisis harus dapat menentukan *stakeholders* yang ditunjukkan dalam setiap poin rekomendasi. *Stakeholders* dapat berupa Pemerintah, Lembaga ataupun Instansi, maupun masyarakat.

PENUTUP

Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual ini agar dapat digunakan sebagai acuan Analisis Media untuk dapat menyusun rekomendasi isu aktual yang tepat. Selain itu, agar pedoman ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya sebagai referensi membuat rekomendasi isu aktual.

Kepala Bagian
Media Cetak dan Media Sosial



Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. (Drs.)
NIP: 19651031 199403 1 002

Lampiran 5

RESUME SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN REKOMENDASI ISU AKTUAL

Hari/tanggal : Jumat, 4 Juni 2021
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Ruang Medtaksos, Nusantara II DPR RI
Kegiatan : Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual
Pimpinan Kegiatan : Suciati

Kegiatan dihadiri oleh : 1. Kasubbag Analisis Media;
2. Para Staf Sub Bagian Analisis Media.

Notulis : Larissa Amanda Indianti.

- I. Kegiatan sosialisasi dibuka jam 10.00 WIB oleh Suciati.
- II. Hasil diskusi bersama Kasubbag Analisis Media dan rekan-rekan kerja Analisis Media, yaitu sebagai berikut:
 - *Pointers* dalam Bagian Teknik dan Strategi Penentuan Isu agar tidak menggunakan kalimat negatif, seperti *pointer* yang sebelumnya tertulis "Isu bertentangan dengan kebijakan atau regulasi" dapat diganti dengan isu terkait kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
 - Penjelasan setiap *pointer* agar dapat diperkuat;
 - Pedoman terlihat terlalu banyak tulisan, oleh karena itu disarankan pembaca dapat membaca bagian yang ditebalkan (*bold*) terlebih dahulu. Apabila masih belum memahami, baru dilanjutkan dengan membaca penjelasan;
 - Perlu penambahan subbagian mengenai langkah-langkah penyusunan rekomendasi isu aktual.

III. Kegiatan Ditutup Pukul 11.30 WIB

Jakarta, 4 Juni 2021
Kepala Bagian
Media Cetak dan Media Sosial



Suciati, S.Sos
NIP: 197207201994032002



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Rancangan Aktualisasi Dengan Judul "Efisiensi Kinerja Analis Media Melalui Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual"

HARI/TANGGAL: Jum'at, 4 Juni 2021

No.	NAMA	BAGIAN/UNIT	TANDA TANGAN
1	Suciati, S.Sos.	Kasubag Analis Media	
2	Lanisa Amanda	Analis Media	
3	M. Rizki. R	"	
4	Eni Bachari	"	
5	Fimamb	Analis media	
6	Agung H	Jurnalis	
7	Ridwan B	- - -	
8	Fahmi Harfa	Analis	
9	Narasya A.P.	Analis Media	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Lampiran 6



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Rekomendasi Isu Aktual 9 Juni 2021

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan harga pangan naik hampir 40-50 persen dalam beberapa waktu terakhir, seperti komoditas minyak nabati, daging, gula, sereal, dan produk susu, dikarenakan juga terjadi lonjakan harga pangan global, sehingga berpotensi mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2022, DPR perlu:
 - a. Mendorong Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan harga pangan di Indonesia, mengingat pergerakan harga pangan bergantung pada cuaca dan distribusi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, sehingga Pemerintah harus mampu mengantisipasi perubahan kebijakan negara lain secara tiba-tiba, terutama kebijakan yang berkaitan dengan bahan pangan. Karena sampai saat ini Indonesia masih banyak bergantung pada bahan pangan impor;
 - b. Mendorong Pemerintah agar terus mengawasi dan mencermati produksi bahan pangan dan kepastian pasokan pangan di Indonesia, khususnya komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga, serta memastikan komoditas pangan utama lainnya seperti beras, jagung, gandum, dan lainnya tetap terjaga pasokan dan harganya;
 - c. Mendorong Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperhatikan NTP dan NTN di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan saat ini, mengingat NTP dan NTN merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemampuan atau daya beli petani dan nelayan di wilayah pedesaan;
 - d. Mendorong Pemerintah melakukan upaya untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi naiknya harga pangan saat ini, mengingat peningkatan ekonomi nasional harus didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dan memulihkannya kondisi pandemi Covid-19;
 - e. Mendorong Pemerintah mengupayakan untuk mengutamakan produksi pangan dari dalam negeri atau dari petani lokal ketimbang mengandalkan bahan pangan impor, mengingat saat ini tengah terjadi situasi kenaikan bahan pangan global yang dapat berpengaruh terhadap naiknya bahan pangan yang dijual di dalam negeri.

2. Alat *Tsunami Early Warning System* (TEWS) atau alat peringatan dini tsunami yang dipasang sejak 10 tahun lalu oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah hampir usang, sebagian mulai tidak berfungsi, dan juga ada yang hilang, DPR perlu:



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- a. Mendorong BMKG, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), bersama Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap titik-titik yang sebelumnya telah ditetapkan untuk dilakukan pemasangan TEWS, sehingga sirene peringatan tsunami yang sudah tidak berfungsi dan hilang dapat segera diperbaharui dan ditambah;
 - b. Mendorong BMKG dan BPPT mempersiapkan anggaran yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sistem peringatan dini gempa dan tsunami, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sejumlah wilayah yang terindikasi rawan terhadap terjadi gelombang tsunami, sehingga keberadaan *buoy* dengan kualitas yang baik menjadi hal yang penting;
 - c. Menyampaikan bahwa DPR RI mendukung BMKG dan BPPT dalam pengadaan dan pengembangan TEWS produk buatan dalam negeri, seperti *InaBuoy*, namun tetap harus memastikan TEWS tersebut memiliki kualitas, fungsi, dan keakuratan yang baik;
 - d. Mendorong BMKG agar dapat mensosialisasikan kepada Pemda mengenai perawatan dan peremajaan TEWS, mengingat pentingnya fungsi TEWS sebagai perangkat untuk mitigasi tsunami;
 - e. Mendorong Pemda, khususnya bagi Pemda di wilayah-wilayah rawan tsunami, selain memastikan ketersediaan TEWS, juga mempersiapkan sarana dan prasarana mitigasi di sejumlah pantai-pantai, termasuk rambu-rambu dan jalur evakuasi di permukiman, sebagai kelengkapan pendukung mitigasi bencana tsunami;
 - f. Mendorong Pemerintah berkomitmen membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi adanya ancaman bencana tsunami maupun gempa di Indonesia, salah satunya dengan mengoptimalkan sistem peringatan dini tsunami atau *Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS)*.
3. Terkait mulai disosialisasikannya draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2019 ke 11 kota sejak Februari hingga Juni 2021 dan saat ini tengah beredar draf RKUHP yang menjadi perhatian masyarakat, DPR perlu:
- a. Menjelaskan bahwa draf yang tengah beredar dan menjadi perhatian masyarakat saat ini bukanlah draf final. Hingga kini, belum ada pembahasan resmi mengenai RKUHP antara DPR dan pemerintah, karenanya DPR akan memanggil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membahas kelanjutan dari RKUHP;
 - b. Menyampaikan bahwa DPR dan Pemerintah akan tetap berupaya untuk transparan dalam melakukan pembahasan, DPR juga akan terbuka untuk menerima masukan serta aspirasi masyarakat sehingga Undang-Undang yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- c. Menyampaikan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif akan terus berupaya untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang, khususnya yang telah masuk dalam Program legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, karenanya DPR meminta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan dan menghasilkan Undang-Undang yang aspiratif dan partisipatif.
4. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempersiapkan inovasi untuk memindahkan informasi data kependudukan dalam e-KTP dari blanko fisik ke digital sehingga dapat disimpan di telepon genggam (Handphone/HP), DPR perlu:
 - a. Menyampaikan bahwa dalam menjawab tantangan teknologi informasi yang pesat, inovasi dalam pendataan kependudukan sangat dibutuhkan. Namun, Dukcapil Kemendagri harus mengkaji secara cermat dan mendalam serta memperhatikan berbagai aspek terutama keamanan data kependudukan yang belakangan ini kerap diretas dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;
 - b. Meminta penjelasan Kemendagri mengenai rencana tersebut mengingat selain penyimpanan data di HP, pemerintah juga dapat melacak data penduduk melalui pergerakan HP penduduk yang berisikan data kependudukan digital, hal ini tentu perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan dari pelacakan HP milik penduduk;
 - c. Mendorong Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk tetap memberikan perhatian pada perbaikan sistem pelayanan pembuatan e-KTP, seperti meningkatkan kecepatan pelayanan dan memperhatikan ketersediaan blanko yang kerap menjadi hambatan dalam pencetakan e-KTP;
 - d. Mendorong Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk meningkatkan sistem keamanan data kependudukan yang dimiliki pusat maupun daerah agar sistem tersebut tidak mudah diretas dan dimanfaatkan oleh oknum untuk dijual belikan secara bebas guna mendapatkan keuntungan pribadi.
 5. Menteri Investasi-Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan fakta bahwa banyak kawasan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia tidak diminati banyak investor, DPR perlu:
 - a. Mendorong Pemerintah meminta kepada pemilik atau pengelola kawasan industri di KEK untuk menetapkan harga jual tanah disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dan meminta untuk tidak mengambil keuntungan terlalu besar, mengingat tingginya harga tanah menjadi indikator penentu minat investor untuk berinvestasi;



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- b. Mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan, sehingga KEK dapat segera dikembangkan, guna mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di KEK;
- c. Mendorong Pemda melakukan studi banding kepada Pemda lain yang telah berhasil melakukan pembangunan kawasan industri dan menarik minat investor dalam KEK, seperti kawasan industri terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, sehingga daerah lain dapat mengadopsi sistem KIT Batang dan mempercepat proses pembangunan di KEK;
- d. Mendorong Pemerintah untuk membuat prioritas jenis industri yang akan dibangun, yaitu industri yang memiliki potensi cepat berkembang dan dibutuhkan banyak orang, seperti teknologi dan manufaktur, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya;
- e. Mendorong Pemerintah untuk membuat infrastruktur pendukung bagi pembangunan KEK, seperti kemudahan akses transportasi, sehingga industri di KEK dapat cepat berkembang.





BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

**Rekomendasi Isu Aktual
Mei 2021**

1. Pemerintah berencana untuk mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako, DPR perlu:
 - a. Meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji dan mempertimbang kembali rencana pengenaan tarif PPN tersebut, mengingat saat ini ekonomi belum pulih dan daya beli masyarakat masih lemah akibat pandemi Covid-19, sehingga pengenaan tarif PPN pada sembako akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama yang memiliki pendapatan rendah;
 - b. Meminta Kemenkeu mempertimbangkan kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) apabila sembako dikenakan tarif, sebab banyak UMKM yang pendapatannya menurun, bahkan terpaksa gulung tikar akibat pandemi Covid-19, mengingat UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga jangan sampai pengenaan tarif PPN sembako semakin menekan pendapatan UMKM;
 - c. Mendorong Kemenkeu menunda pengenaan tarif PPN pada sembako maupun rencana kenaikan tarif PPN pada barang lainnya hingga pandemi benar-benar berakhir dan ekonomi masyarakat dipastikan sudah pulih, sehingga penetapan tarif PPN tersebut dinilai tidak terlalu memberatkan masyarakat ketika daya beli mereka sudah tinggi;
 - d. Mendorong Pemerintah mengoptimalkan realisasi bantuan sosial dan maupun program perlindungan sosial lainnya untuk menstimulus daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat dapat segera pulih;
 - e. Mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan dan mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti mengoptimalkan potensi bea cukai dan meningkatkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta melakukan reformasi perpajakan berbasis teknologi.

2. Presiden RI menargetkan 1 juta vaksinasi per hari yang dimulai pada Juli 2021. Pemerintah berencana mulai memperluas pemberian vaksin bagi kelompok masyarakat berusia 18 tahun ke



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

atas yang sebelumnya sudah dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai pilot project, DPR perlu:

- a. Mengingatkan pemerintah bahwa realisasi 1 juta vaksinasi per hari sulit dilakukan jika ketersediaan stok vaksin terbatas, karenanya untuk mendukung target program vaksinasi massal pemerintah harus memastikan kebutuhan vaksin di daerah dapat tercukupi;
 - b. Mendorong Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk memberikan arahan kepada setiap Pemda sebagai bahan pertimbangan untuk mempercepat vaksinasi warga berusia 18 tahun ke atas, agar Pemda juga terdorong untuk segera memulai vaksinasi warganya sehingga target vaksinasi dapat terpenuhi;
 - c. Mendorong Kementerian Kesehatan bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan evaluasi vaksinasi secara berkala untuk mengetahui hal-hal yang menjadi hambatan saat vaksinasi, sehingga dapat dicari solusi tepat untuk mempercepat vaksinasi;
 - d. Mendorong Kemenkes dan Pemda melalui Dinas Kesehatan selain memperbanyak sentra vaksinasi agar mudah dijangkau masyarakat, pemerintah juga perlu untuk menggiatkan program vaksinasi jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan datang ke sentra vaksinasi seperti kelompok masyarakat lanjut usia;
 - e. Mendorong Pemda melalui Dinas Kesehatan setempat untuk aktif melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada warganya tentang cara mendapatkan vaksin, mengingat banyak warga yang berinisiatif untuk segera divaksin namun tidak mengetahui tata cara untuk mengakses vaksin Covid-19.
3. Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi listrik dan elpiji tiga kilogram (kg) pada tahun 2022, penyaluran bantuan direncanakan akan terhubung dengan program bantuan sosial lainnya sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DPR perlu:
- a. Menyambut baik rencana penyaluran bantuan menggunakan satu basis data yang sama, sebab hal ini dapat meminimalisir



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- pemberian subsidi listrik dan elpiji tiga kg yang kerap tidak tepat sasaran, yang berdasarkan data hanya 26 persen masyarakat miskin dan rentan miskin yang menikmati subsidi listrik;
- b. Mendorong pemerintah untuk mengkaji secara matang penggunaan DTKS sebagai dasar untuk pemberian bantuan sosial, sebab hingga kini masih ditemukan sejumlah masalah pada DTKS yang mengakibatkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran;
 - c. Mendorong pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga independen dalam proses pembaruan DTKS sehingga tidak terjadi bias data terkait calon penerima subsidi;
 - d. Menyampaikan bahwa DPR akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menangani permasalahan DTKS, khususnya melakukan pembersihan dan verifikasi data secara berkala sehingga DTKS siap menjadi rujukan untuk penyaluran seluruh program bansos.





BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

**Rekomendasi Isu Aktual
11 Juni 2021**

1. Pemerintah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan atau sekolah, rencana tersebut tercantum dalam draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), DPR perlu:
 - a. Mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai rencana pengenaan pajak terhadap jasa pendidikan, mengingat jika rencana itu diterapkan tentu akan semakin memberatkan masyarakat karena biaya pendidikan baik formal, nonformal, dan informal akan mengalami kenaikan;
 - b. Mendorong Kemenkeu untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali rencana pengenaan pajak terhadap jasa pendidikan, dan mengusulkan untuk mengenakan pajak pada sekolah dan universitas swasta ternama yang anak didiknya merupakan masyarakat kalangan atas dan ekspatriat;
 - c. Mendorong Kemenkeu untuk segera menyerahkan draf RUU KUP kepada DPR agar dapat segera dibahas lebih lanjut, mengingat saat ini draf tersebut lebih dulu bocor dan beredar di masyarakat sehingga mengakibatkan keresahan yang berujung polemik;
 - d. Menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU KUP, DPR akan selalu memperhatikan kondisi masyarakat saat ini yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19, agar UU yang dihasilkan tidak memberatkan masyarakat. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain yang tidak secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Pemerintah menargetkan digitalisasi 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 2024, DPR perlu:
 - a. Mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mempercepat realisasi rencana tersebut, mengingat per Maret 2021 sebanyak 21% pelaku UMKM telah mampu memasarkan produknya lewat platform digital, sehingga



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- bukan tidak mungkin digitalisasi 30 juta UMKM bisa dicapai lebih cepat dari target yang ditentukan;
- b. Mendorong Kemenkop UKM segera menyusun peta jalan, anggaran, serta strategi program percepatan digitalisasi UMKM sebagai bentuk komitmen pemerintah merealisasikan rencana tersebut;
 - c. Mendorong Pemerintah menyiapkan infrastruktur serta sarana dan prasarana digital yang mumpuni serta praktis, berupa *platform* dan sistem digital hingga penyediaan *smartphone*, sehingga seluruh UMKM dapat mudah terdigitalisasi;
 - d. Mendorong Kemenkop UKM memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku UMKM, sehingga mereka mampu mengembangkan produk yang berkualitas dengan sistem yang baik, serta jangkauan pemasaran produknya bisa lebih luas;
 - e. Mendorong Kemenkop UKM menjadikan komunitas-komunitas UMKM menjadi mitra dalam menjalankan percepatan digitalisasi UMKM.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan bahwa obat Ivermectin yang saat ini disebar ke beberapa daerah sebagai obat pasien Covid-19 merupakan obat keras, tidak dijual bebas yang penggunaannya harus dengan resep dokter, serta memiliki efek samping yang cukup beragam, DPR perlu:
- a. Mendorong BPOM untuk memberikan penjelasan secara masif kepada masyarakat mengenai kandungan dan dampak obat tersebut jika digunakan oleh pasien Covid-19 secara bebas tanpa resep dokter, sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak salah dalam menggunakan obat-obatan;
 - b. Meminta BPOM bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengawasi peredaran obat tersebut agar tidak dapat dibeli secara langsung oleh masyarakat mengingat bahaya efek samping obat tersebut jika digunakan tanpa pengawasan dokter;
 - c. Mendorong Kementerian Kesehatan dan BPOM berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk menginformasikan obat-obatan yang aman digunakan pasien terinfeksi Covid-19 untuk memperkuat imunitas tubuh;



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- d. Mengimbau masyarakat untuk mengkonsultasikan penggunaan obat kepada dokter dan tidak mengonsumsi obat-obatan secara bebas tanpa mengetahui kegunaan, kandungan, dan efek samping serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari obat tersebut, guna menjamin keamanan penggunaan obat dalam upaya menjaga diri terhindar dari Covid-19.





BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

Rekomendasi Isu Aktual

14 Juni 2021

1. Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini dapat mengakibatkan krisis tenaga medis dikarenakan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) ikut terpapar virus corona, DPR perlu:
 - a. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pendataan ke rumah sakit-rumah sakit, sehingga dapat diketahui kebutuhan nakes di setiap rumah sakit;
 - b. Mendorong Kemenkes berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan penambahan nakes ke rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan penambahan nakes, seperti dengan mengalokasikan nakes dari rumah sakit lain ke rumah sakit yang kekurangan nakes;
 - c. Mendorong Kemenkes berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk berupaya menjaga kesehatan para nakes dalam bekerja, seperti dengan mengatur jam kerja nakes, pemberian asupan vitamin, dan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), mengingat nakes berisiko terpapar virus karena kelelahan yang dapat berpotensi menurunkan daya tahan tubuh;
 - d. Mendorong Kemenkes mensosialisasikan kepada rumah sakit mengenai prosedur atau tata cara pengajuan nakes tambahan apabila rumah sakit tersebut kekurangan nakes akibat banyak nakes yang terpapar Covid-19;
 - e. Mendorong Kemenkes memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki anggaran untuk memenuhi nakes tambahan di rumah sakit yang membutuhkan penambahan nakes dengan tetap mengikuti aturan di Keputusan Menteri Kesehatan;
 - f. Mendorong Kemenkes mencari relawan yang sesuai dengan kriteria dan kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu tugas nakes dalam penanganan pandemi Covid-19;
 - g. Mendorong Kemenkes agar mengarahkan dan mengimbau para lulusan tenaga kesehatan, terutama yang belum bekerja, untuk dapat mengabdikan diri dengan menjadi relawan Covid-19 untuk membantu Pemerintah memenuhi kekurangan nakes.
2. Sampai saat ini program vaksinasi virus corona masih belum menyentuh ke anak-anak, padahal penyebaran virus semakin meluas dan pembelajaran secara tatap muka akan dilakukan dalam kurun waktu dua minggu lagi, DPR perlu:
 - a. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI), dan organisasi lainnya terkait vaksinasi anak, untuk terus mengkaji keamanan vaksin bagi anak-anak atau masyarakat yang berusia di bawah 16



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- tahun, mengingat vaksin Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca baru direkomendasikan bagi masyarakat yang berusia di atas 16 tahun;
- b. Mendorong Kemenkes bersama IDAI untuk memastikan persiapan proses uji klinis vaksin kepada anak-anak dilakukan secara hati-hati dan bertahap, agar vaksinasi pada anak nantinya tidak akan menimbulkan efek samping yang mengkhawatirkan dan berdampak jangka panjang bagi tumbuh kembang anak;
 - c. Mendorong Kemenkes bersama peneliti vaksin agar terus meneliti jenis-jenis vaksin yang telah mendapatkan perizinan edar di Indonesia dengan memperhatikan aspek keamanan, tolerabilitas dan imunogenisitas, beserta dosis yang tepat untuk diberikan kepada anak-anak.
3. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan pembelian delapan kapal perang buatan perusahaan senjata asal Italia, Fincantieri, dengan rincian enam kapal perang kelas FREMM dan dua fregat kelas Maestrale yang telah dimodernisasi, DPR perlu:
- a. Mendorong Kemenhan untuk memberikan penjelasan kepada DPR mengenai asal anggaran yang digunakan untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) tersebut, mengingat belum ada pembahasan terkait anggaran pembelian delapan kapal perang tersebut dengan DPR;
 - b. Mendorong Kemenhan bersama TNI untuk menjelaskan kepada DPR mengenai tujuan pembelian dan rencana pemanfaatan delapan kapal perang tersebut dalam memperkuat pertahanan perairan Indonesia;
 - c. Menyampaikan bahwa DPR akan mendukung upaya Pemerintah dalam memperkuat pertahanan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya diharapkan pemerintah dapat bertindak secara transparan dan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran pembelian alutsista, mengingat anggaran untuk pembelian alutsista tidaklah sedikit.
4. Pemerintah berencana memperpanjang kebijakan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100% ditanggung pemerintah (DTP) di tengah polemik rencana penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako, jasa pendidikan, dan biaya persalinan, DPR perlu:
- a. Meminta Pemerintah menjelaskan kepada publik terkait rencana kebijakan insentif PPnBM tersebut, mengingat rencana tersebut dinilai kontra dengan rencana pengenaan tarif PPN pada sembako yang bertujuan mendongkrak penerimaan negara, namun di sisi lain akan memberatkan masyarakat, terutama kalangan berpendapatan rendah;



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- b. Meminta Pemerintah melakukan evaluasi dan mengkaji kembali dampak penerapan insentif PPnBM pada perekonomian dan melakukan perbandingan dengan rencana pengenaan tarif PPN pada sembako, guna dapat mengambil keputusan yang memiliki dampak lebih besar pada perekonomian Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat kecil.
5. Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan bahwa pelaksanaan haji tahun 2021 dibatasi sebanyak 60 ribu jemaah yang merupakan jemaah domestik baik penduduk Arab Saudi maupun ekspatriat, DPR perlu:
 - a. Menghargai sikap Pemerintah Arab Saudi yang tetap menyelenggarakan ibadah haji secara terbatas karena mengutamakan kesehatan umat muslim, sebab hingga kini pandemi Covid-19 belum berakhir;
 - b. Menyampaikan bahwa adanya kejelasan mengenai penyelenggaraan ibadah haji dari Pemerintah Arab Saudi ini juga dapat menjawab rasa penasaran masyarakat mengenai kepastian pelaksanaan haji meskipun sebelumnya Pemerintah telah menjelaskan alasan tidak memberangkatkan jemaah Indonesia pada tahun ini;
 - c. Mengajak seluruh umat muslim Indonesia khususnya calon jemaah haji agar ikhlas dan bersabar atas keputusan ini, dan meminta seluruh umat muslim Indonesia untuk bersama-sama berdoa dan berusaha agar pandemi di Indonesia serta di seluruh dunia yang terdampak dapat segera usai, sehingga tahun depan umat muslim di Indonesia dan seluruh dunia dapat berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji;
 - d. Menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemenag) akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam mempersiapkan pemberangkatan haji selanjutnya, dan DPR akan mendorong Kemenag untuk berupaya mengurangi jumlah antrian haji yang semakin banyak sebagai dampak penundaan pemberangkatan sebanyak dua kali, dengan mendorong negosiasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota jemaah haji Indonesia di tahun selanjutnya.
 6. Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian di Indonesia untuk memberantas dan menindak setiap aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat, sebagaimana instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan berkaitan dengan hal tersebut, saat ini tercatat lebih dari 100 orang yang telah ditangkap oleh aparat di berbagai wilayah di Indonesia, DPR Perlu:
 - a. Mengapresiasi kinerja Kepolisian atas upaya pemberantasan aksi premanisme dan praktik pungutan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia serta mengingatkan agar upaya ini tidak hanya dilakukan



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- sementara atau karena adanya instruksi dari Presiden saja, namun dapat berjalan berkelanjutan sehingga tidak ada lagi praktek premanisme dan pungli di seluruh daerah di Indonesia;
- b. Mendorong Kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh sehingga masalah premanisme dan pungutan liar dapat diberantas hingga ke akarnya;
 - c. Mendorong aparat penegak hukum segera menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - d. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membuat program pemulihan terhadap pelaku premanisme dan praktik pungli guna mendapat kesempatan untuk mencari penghasilan dengan cara yang halal;
 - e. Mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kepada aparat keamanan apabila melihat atau menjadi korban dari praktik premanisme dan pungli.





BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

**Rekomendasi Isu Aktual
15 Juni 2021**

1. Kenaikan signifikan jumlah kasus Covid-19 harian selama beberapa waktu terakhir pasca libur lebaran berdampak pada semakin terbatasnya jumlah ketersediaan tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19 di rumah sakit, DPR perlu:
 - a. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan Pemerintah Daerah (Pemda) mencari solusi dan strategi untuk memenuhi kekurangan tempat tidur, mengingat masyarakat saat ini mulai kesulitan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit karena banyak yang sudah penuh;
 - b. Mendorong Kemenkes, Satgas Penanganan Covid-19, dan Pemda untuk memperbanyak rumah sakit yang dapat melakukan perawatan Covid-19, sehingga masyarakat yang terinfeksi dengan gejala berat dapat segera mendapatkan perawatan intensif
 - c. Mendorong Kemenkes, Satgas Penanganan Covid-19, dan Pemda untuk meningkatkan testing serta tracing khususnya di daerah yang merupakan zona merah Covid-19, serta melakukan pengetatan karantina wilayah di daerah tersebut guna meminimalisir potensi penyebaran kasus semakin meluas;
 - d. Mendorong pemerintah pusat, Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemda menarik rem darurat untuk memperketat pembatasan kegiatan masyarakat, mengingat jika tidak ada langkah tegas pemerintah dikhawatirkan Covid-19 semakin sulit terkendali dan akan berdampak pada upaya pemulihan ekonomi yang saat ini mulai berjalan;
 - e. Mendukung langkah Presiden yang menargetkan 100 ribu vaksinasi per hari, diharapkan target ini benar-benar dapat direalisasikan oleh Pemda agar kekebalan komunal segera tercapai. Namun dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah pusat diharapkan terus berupaya mendatangkan vaksin Covid-19 sehingga proses vaksinasi tidak terhambat akibat keterbatasan vaksin.



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

2. Pemerintah berencana untuk membuka kembali pariwisata Bali, Batam, dan Bintan untuk wisatawan mancanegara (wisman) dengan skema *travel corridor arrangement* (TCA) dengan uji coba pada Juli 2021. Dengan syarat wisman yang datang harus sudah menjalani vaksinasi Covid-19 dan bersedia di karantina selama lima hari, DPR perlu:
 - a. Meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempersiapkan kebijakan pembukaan wisman secara matang dan mengutamakan prinsip kehati-hatian, dengan tetap memperhatikan kondisi penyebaran kasus Covid-19 khususnya di daerah yang menjadi destinasi wisata, untuk mencegah kebijakan ini menjadi bumerang bagi daerah dalam menangani pandemi;
 - b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan tidak hanya pelaku wisata, tetapi juga masyarakat yang tinggal di daerah destinasi wisata telah divaksin 100 persen, sebagai upaya melindungi masyarakat terinfeksi Covid-19 dari virus yang dibawa oleh wisman;
 - c. Mendorong pemerintah untuk menyeleksi secara ketat negara-negara yang diberikan akses untuk datang berwisata ke Indonesia, dengan memperhatikan kondisi pengendalian kasus di negara tersebut
 - d. Mendorong Kemenparekraf, Kemenkes, dan Pemda untuk menyiapkan skema dan sarana prasarana karantina kesehatan bagi para wisman, agar ketentuannya jelas dan sistematis serta menutup celah bagi oknum untuk memanfaatkan kondisi tersebut guna mendapatkan keuntungan dengan meloloskan wisman dari karantina kesehatan;
 - e. Mendorong Kemenparekraf dan Pemda untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung protokol Covid-19 di tempat wisata seperti tempat mencuci tangan, alat pengecekan suhu, serta stiker dan poster yang menyerukan wisatawan untuk menjaga jarak, guna mendukung penerapan protokol Covid-19 di tempat wisata.



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

3. Varian baru virus SARS-CoV-2 yang lebih ganas dan cepat menular atau disebut Delta, menyebar di sejumlah daerah. Berdasarkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, varian Delta ditemukan pada spesimen pasien Covid-19 di Kudus (Jawa Tengah), DKI Jakarta, dan Bangkalan (Madura, Jawa Timur) dan menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sepekan terakhir jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah 38,31 persen, tren perawatan di ruang isolasi bertambah 27,43 persen dan pasien yang memerlukan perawatan intensif bertambah 18,09 persen, DPR perlu:
 - a. Mendorong Kemenkes untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 guna mencegah varian baru yang lebih ganas dan cepat menular serta mendukung program Presiden Joko Widodo yang menargetkan 100 vaksinasi perhari;
 - b. Mendorong pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) serta Satgas Penanganan Covid-19 untuk mengambil langkah luar biasa, dengan mengkaji kembali Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang selama ini dilakukan, guna meredam angka penularan kasus Covid-19 yang melonjak saat ini dan juga mengantisipasi kolapsnya fasilitas kesehatan karena keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate melampaui batas;
 - c. Mendorong pemda untuk transparan dan jujur tentang kondisi kesehatan di wilayahnya agar pemerintah pusat bersama Satgas Penanganan Covid-19 dapat memetakan daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus dan serius serta harus segera diambil langkah-langkah khusus dalam penanganan Covid-19;
 - d. Mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menghindari tempat-tempat kerumunan guna mencegah bertambahnya kasus Covid-19.



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

**Rekomendasi Isu Aktual
16 Juni 2021**

1. Pemerintah menyatakan telah merampungkan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). SKB pedoman implementasi UU ITE tersebut akan ditandatangani pada Rabu (16/6), oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Nantinya, SKB pedoman implementasi UU ITE tidak berbentuk dalam peraturan perundang-undangan, melainkan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus UU ITE, DPR perlu:
 - a. Mendorong kepada pemerintah segera menyosialisasikan SKB pedoman implementasi UU ITE yang telah ditandatangani kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, agar dapat mengetahui dan memahami isi-isi pedoman yang terkandung dalam SKB UU ITE, dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar penindakan;
 - b. Mengimbau kepada aparat penegak hukum agar dalam memproses penegakan dan penindakan hukum terkait kasus ITE harus mengacu pada SKB pedoman implementasi UU ITE;
 - c. Meminta kepada pemerintah agar tidak melupakan revisi UU ITE yang merupakan inisiatif dari pemerintah, karena revisi UU ITE bertujuan untuk menghapus pasal karet atau pasal yang dinilai multitafsir dan untuk mengakhiri polemik UU No.19/2016 tentang UU ITE di masyarakat;
 - d. Mendorong kepada pemerintah agar revisi UU ITE dilakukan secara komprehensif, mengingat sebelumnya pemerintah berencana hanya merevisi empat pasal, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36, serta penambahan Pasal 45 c;
 - e. Menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah akan membuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun masukan terkait revisi UU ITE, sehingga diharapkan UU ITE yang dihasilkan mampu memenuhi harapan masyarakat.



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

2. Pemerintah telah menyelesaikan tahapan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di 12 kota besar di Indonesia. Draf Usulan RKUHP akan diajukan oleh Pemerintah ke Badan Legislasi DPR untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021, DPR perlu:
 - a. Mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) segera meyerahkan draf usulan RKUHP ke DPR untuk kemudian dibawa ke tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR;
 - b. Mendorong Kemenkumham untuk mempertimbangkan masukan masyarakat yang diperoleh selama sosialisasi RKUHP dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;
 - c. Menyampaikan bahwa DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk transparan dalam melakukan pembahasan, dan membuka ruang terhadap aspirasi dari masyarakat sehingga Undang-Undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia;
 - d. Menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah berkomitmen untuk selalu mengedepankan asas-asas hukum pidana dan prinsip kehati-hatian dalam membahas RKUHP khususnya pada pasal-pasal yang menuai kontroversi.
 - e. Menyampaikan bahwa DPR berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian pembahasan RKUHP, diharapkan KUHP baru dapat menjadi produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia menggantikan KUHP produk kolonial.
3. Lonjakan kasus Covid-19 saat ini yang terjadi di Indonesia, diperkirakan berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021, DPR perlu:
 - a. Mendorong Pemerintah terus mengoptimalkan pergerakan ekonomi agar tetap berjalan, dengan merealisasikan program pemulihan ekonomi nasional sesuai rencana, sehingga target pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal II 2021 dapat tercapai;
 - b. Mendorong Pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu anjloknya perekonomian, ketika pemerintah kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- untuk menekan laju penyebaran Covid-19, seperti dengan memperpanjang program bantuan sosial dan bantuan produktif untuk usaha mikro, serta menggenjot pengembangan ekonomi digital, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan;
- c. Mendorong Pemerintah tetap memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
 - d. Mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dan taktis guna menghadapi lonjakan kasus Covid-19;
 - e. Meminta Kemendikbud mempertimbangkan kembali untuk menunda pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) hingga situasi Covid-19 benar-benar aman dan terkendali;
 - f. Mendorong Pemerintah memastikan persediaan dan keamanan vaksin Covid-19, serta melakukan percepatan proses vaksinasi, sehingga tercipta kekebalan komunal, guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat;
 - g. Mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan bersedia untuk menerima vaksin Covid-19.
4. Satuan tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa ada kemungkinan untuk melakukan vaksinasi ulang kepada seseorang yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh namun tetap masih terpapar virus Corona, seperti kasus banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19 meskipun sudah divaksinasi dua kali, DPR perlu:
- a. Meminta penjelasan pemerintah terkait data jumlah orang yang sudah mendapatkan vaksin lengkap namun masih terpapar Covid-19, hal ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah mengenai efektivitas vaksin dalam mencegah penyebaran Covid-19;
 - b. Mempertanyakan efikasi vaksin yang diberikan kepada masyarakat Indonesia saat ini, apakah banyaknya nakes yang terpapar Covid-19 meskipun telah mendapatkan vaksin penuh dikarenakan lemahnya efikasi vaksin yang diberikan atau karena lambatnya realisasi vaksinasi, sehingga orang yang sudah divaksinasi juga masih tetap belum mampu melawan virus Corona;
 - c. Mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan kriteria ketahanan tubuh seseorang yang harus divaksinasi ulang, sebab



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat bahwa tidak semua orang yang divaksinasi memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari paparan virus Corona;

- d. Mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan vaksinasi ulang dengan ketersediaan vaksin, agar hal ini tidak menjadi hambatan terhadap target program vaksinasi bagi 181,5 juta penduduk, sehingga kekebalan komunal tercapai.





BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

**Rekomendasi Isu Aktual
17 Juni 2021**

1. Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawai mengungkap ditemukannya buku catatan yang didapat usai menangkap pemasok senjata kelompok kriminal bersenjata (KKB) Neson Murib. Catatan tersebut berisi adanya bantuan uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Puncak sebesar Rp600 juta serta bantuan dana lainnya dari Ketua DPRD Kabupaten Tolikara untuk KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen, DPR perlu:
 - a. Mengapresiasi Satgas Nemangkawai yang berhasil menangkap pemasok senjata untuk KKB, dan meminta Satgas Nemangkawai untuk terus menyelidiki dan menangkap pihak-pihak yang menyuplai senjata untuk KKB, sebagai upaya untuk mencegah aksi teror bersenjata kembali terjadi di Papua;
 - b. Mendorong Satgas Nemangkawai untuk memastikan kebenaran informasi yang berada di buku catatan tersebut, serta mengungkap motif dan menyelidiki lebih jauh peran dan keterlibatan pihak-pihak yang ikut memberikan bantuan dana kepada KKB yang dimanfaatkan untuk mempersenjatai KKB dalam melakukan aksi kekerasan;
 - c. Mendorong aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku pemasok, dan menyelidiki serta memanggil pihak pemberi dana bila memang terbukti adanya peran pemerintah daerah (Pemda) dan pejabat daerah setempat untuk menyokong dana KKB dalam melakukan aksi pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - d. Mengusulkan kepada pemerintah mempertimbangkan untuk menunda penambahan dana otonomi khusus (otsus) Papua jika ternyata dari hasil penyelidikan, pemerintah daerah setempat mendukung kegiatan KKB berupa bantuan dana.
2. Hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa di tengah bonus demografi, 85% generasi milenial Indonesia rentan terpapar radikalisme melalui platform media sosial, DPR perlu:
 - a. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Polisi Siber meningkatkan pengawasan terhadap



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- situs-situs media sosial yang menyebarkan paham radikalisme dan segera melakukan pemblokiran sehingga paham radikalisme tidak terus menyebar;
- b. Mendorong BNPT melakukan langkah antisipasi dari dampak terpaparnya paham radikalisme, terutama pada generasi muda, yaitu munculnya aksi terorisme karena dapat mengancam keamanan negara;
 - c. Meminta ulama dan para tokoh agama untuk menanamkan bahwa paham radikalisme bukanlah ajaran agama karena pada agama apapun mengajarkan kasih sayang dan kebersamaan;
 - d. Mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta pihak sekolah dan universitas untuk ikut berperan aktif mengawasi kegiatan siswa dan mahasiswa di sekolah, terutama yang terindikasi berafiliasi dengan paham radikalisme;
 - e. Mengimbau seluruh keluarga, khususnya orang tua ikut berperan mengawasi anak-anaknya dalam bermedia sosial dalam upaya mencegah terpaparnya paham radikalisme maupun aksi terorisme.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyampaikan bahwa kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di bulan Juli 2021 masih berlaku, namun PTM dapat dihentikan jika diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di kelurahan/desa tersebut, DPR perlu:
- a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu tanggap terhadap penanganan kasus Covid-19 di daerahnya. Sebab seluruh keputusan pelaksanaan PTM bergantung pada kesigapan Pemda dalam memutuskan penerapan PPKM mikro di wilayah tinggi penyebaran kasus Covid-19;
 - b. Meminta Pemda melalui Dinas Pendidikan untuk aktif menyampaikan informasi terkait pembukaan dan penutupan sekolah terhadap satuan pendidikan, agar jangan sampai masih ada satuan pendidikan yang tetap melaksanakan PTM terbatas saat daerah tersebut menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat;



BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN

- c. Meminta Kemendikbudristek dan Pemda melalui Dinas Pendidikan untuk memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan PTM terbatas dan sigap menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika PPKM di daerah tersebut diterapkan;
- d. Mendorong Kemendikbud untuk melakukan evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan PTM, dan menyesuaikan aturan yang ada dengan kondisi penanganan Covid-19 demi menjaga keselamatan para murid.




Lampiran Tambahan

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P
NIP : 199302092020122001
Unit Kerja : Sub Bagian Analisis Media
Jabatan : Analis Konten Media Sosial
Isu Gagasan : Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual


Kegiatan 1 : Menyampaikan usulan pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual kepada Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analisis Media.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.	Usulan agar judul direvisi agar lebih detail, menjadi "Pedoman Pemilihan Isu Untuk Rekomendasi Isu Aktual"	


Kegiatan 2 : Membuat *draft* pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		


Kegiatan 3 : Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan Kasubbag Analisis Media dan rekan kerja Analisis Media yang lain untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman agar dapat mencakup keseluruhan penyusunan rekomendasi isu aktual, sehingga judul menjadi "Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual"; - Perlu dilengkapi dengan pendahuluan, pengertian rekomendasi, pengertian isu aktual, manfaat, dan tujuan rekomendasi, teknik dan strategi penentuan isu, dan teknik dan strategi penyusunan rekomendasi isu aktual. 	


Kegiatan 4 : Revisi *Draft* Pedoman sesuai hasil diskusi bersama Kasubbag dan Rekan Kerja Analis Media, guna memastikan pedoman tersebut mempermudah kinerja analis media

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecaha isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi;	Poin-poin penentuan isu agar dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai berita.	


Kegiatan 5 : Menyusun *Draft* Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual menjadi *Booklet* Pedoman

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.	Perlu penambahan Sub-Bab Langkah-Langkah Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual dan diberikan kalimat penutup, serta tanda tangan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial.	

Kegiatan 6 : Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual kepada Atasan dan Rekan Kerja

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		

Kegiatan 7 : Uji coba atau implementasi pedoman

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.	Sudah dapat diikuti oleh seluruh analis media.	

Kegiatan 8 : Monitoring dan Evaluasi


Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		

Kartu Bimbingan Aktualisasi *Coach*


KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH

Nama : Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P.
NIP : 199302092020122001
Unit Kerja : Sub Bagian Analisis Media
Jabatan : Analis Konten Media Sosial
Isu Gagasan : Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual


Kegiatan 1 : Menyampaikan usulan pembuatan pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual kepada Kepala Bagian Medtaksos, Kepala Subbagian Analisis Media, dan rekan-rekan Analis Media.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Paraf Coach
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.	Jangan lupa melaporkan evidence	


Kegiatan 2 : Membuat draft pedoman penyusunan rekomendasi isu aktual.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Paraf Coach
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		


Kegiatan 3 : Mengadakan forum dengar pendapat dan masukan dengan Kasubbag Analisis Media dan rekan kerja Analisis Media yang lain untuk mendapatkan masukan dan saran terkait pedoman.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Paraf Coach
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		


Kegiatan 4 : Revisi Draft Pedoman sesuai hasil diskusi bersama Kasubbag dan Rekan Kerja Analisis Media, guna memastikan pedoman tersebut mempermudah kinerja analisis media

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Paraf Coach
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		


Kegiatan 5 : Menyusun Draft Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual menjadi Booklet Pedoman

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Paraf Coach
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		


Kegiatan 6 : Mensosialisasikan Pedoman Penyusunan Rekomendasi Isu Aktual kepada Atasan dan Rekan Kerja

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Paraf Coach
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		

Kegiatan 7 : Uji coba atau implementasi pedoman

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Paraf Coach
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		

Kegiatan 8 : Monitoring dan Evaluasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Paraf Coach
Tahapan kegiatan; Output kegiatan terhadap pemecahan isu; Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; Kontribusi Terhadap Visi- Misi Organisasi; Penguatan Nilai Organisasi.		

Lampiran Tambahan (2)

Dokumentasi Sesi *Coaching*



Gambar 1 Lampiran Sesi *Coaching* 18 Mei 2021



Gambar 2 Lampiran Sesi *Coaching* 22 Juni 2021